



LAPORAN TAHUNAN

**DIREKTORAT PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN
TAHUN 2025**

GEDUNG

JAKARTA 2026

Sambutan

Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

"Dengan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja kami kepada publik. Laporan ini menggambarkan berbagai capaian, tantangan, serta langkah strategis yang telah kami lakukan dalam pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sepanjang tahun.

Berbagai dinamika yang kami hadapi menjadi dorongan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas pengawasan secara berkelanjutan. Dengan berlandaskan komitmen terhadap pelayanan publik yang prima, penguatan inovasi, serta sinergi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, kami berupaya membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan perlindungan kesehatan yang optimal."




Anisyan, S.Si, Apt, MP

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....	4
BAB 3 HASIL KEGIATAN.....	21
BAB 4 PENUTUP	74
Tim Kerja.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.....	3
Gambar 2 Layanan Aksesibilitas Digital Bagi Kelompok Rentan	12
Gambar 3 Layanan Aksesibilitas Digital video dengan fitur bahasa isyarat Indonesia (BISINDO).....	13
Gambar 4 Layanan Aksesibilitas Digital informasi media cetak berupa leaflet dan huruf braille	14
Gambar 5 Area parkir khusus untuk pelanggan prioritas	15
Gambar 6 Jalur Pemandu ke arah ruang layanan dan jalur landai	16
Gambar 7 Ruang tunggu area prioritas	16
Gambar 8 Loket Prioritas.....	17
Gambar 9 Sarana Penunjang lain	18
Gambar 10 Supervisi Loka POM di Kab. Toba.....	44
Gambar 11 penjelasan publik/ public warning terhadap OBA dan SK yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)	46
Gambar 12 kegiatan Bimbingan Teknis Iklan dan Penandaan bagi UPT Badan POM pada tanggal 26–27 Februari 2025	48
Gambar 13 kegiatan FONDASI 9 Mei 2025	50
Gambar 14 Upgrading Pemahaman Penerapan Cpotb Pada Personil Kunci Industri Obat Bahan Alam (Oba), Obat Kuasi (Ok), dan Suplemen Kesehatan (Sk) - 3 Juni 2025	63
Gambar 15 Upgrading Pemahaman Penerapan Cpotb Pada Personil Kunci Industri Obat Bahan Alam (Oba), Obat Kuasi (Ok), dan Suplemen Kesehatan (Sk) - 12 Agustus 2025.....	64
Gambar 16 Upgrading Pemahaman Penerapan Cpotb Pada Personil Kunci Industri Obat Bahan Alam (Oba), Obat Kuasi (Ok), dan Suplemen Kesehatan (Sk) - 12 November 2025 ..	65
Gambar 17 Forum komunikasi perkuatan pengawasan importasi post-border bahan obat kuasi dan bahan suplemen.....	67
Gambar 18 Forum Komunikasi Dan Monitoring Evaluasi Program Eksportala.....	68
Gambar 19 Temu kinerja tw 2 tahun 2025	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah SDM yang dimiliki Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.....	4
Tabel 2 pegawai Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	6
Tabel 3 data responden Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025	10
Tabel 4 Tabel Anggaran Pada RO	11
Tabel 5 Data Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam tahun 2020 – 2025 ...	27
Tabel 6 Data Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan tahun 2020 – 2025	27
Tabel 7 Data Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Obat Kuasi tahun 2022 - 2025.....	28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data Pegawai berdasarkan Jabatan.....	5
Grafik 2 Profile pengaduan kasus berdasarkan data terpilah.....	19
Grafik 3 Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Bahan Alam Tahun 2020-2025	23
Grafik 4 Profil Temuan Produk pada Sarana Distribusi Obat Bahan Alam	24
Grafik 5 Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam 2020-2025.....	24
Grafik 6 Profil Pemeriksaan Intensifikasi Pengawasan OBA Tahun 2024-2025	25
Grafik 7 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan 2020-2025	25
Grafik 8 Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2020-2025.....	26
Grafik 9 Tren Pengujian Tidak Memenuhi Syarat produk Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi tahun 2020-2025	28
Grafik 10 Profil Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Bahan Alam Tahun 2025.....	29
Grafik 11 Profil Sampling dan Pengujian Laboratorium Suplemen Kesehatan Tahun 2025	30
Grafik 12 Profil Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Kuasi Tahun 2025.....	31
Grafik 13 Hasil Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Tahun 2025.....	32
Grafik 14 Tren pengawasan iklan obat bahan alam tahun 2020-2025.....	32
Grafik 15 Hasil Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Berdasarkan Media Tahun 2025	3
Grafik 16 Hasil Pengawasan Penandaan Obat Bahan Alam Tahun 2020-2025	34
Grafik 17 Hasil Pengawasan Penandaan Obat Kuasi Tahun 2020-2025	35
Grafik 18 Hasil Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan Tahun 2025	36
Grafik 19 Tren pengawasan iklan suplemen kesehatan tahun 2020-2025.....	36
Grafik 20 Hasil Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan Berdasarkan Media Tahun 2025.....	37
Grafik 21 Trend Hasil Pengawasan Penandaan Suplemen Kesehatan tahun 2020-2025	38
Grafik 22 Profil Laporan Efek Samping Obat Bahan Alam yang Diterima oleh BPOM Tahun 2020-2025	40
Grafik 23 Laporan Efek Samping Suplemen Kesehatan yang Diterima oleh BPOM Tahun 2020-2025	41
Grafik 24 Laporan Rata-Rata Nilai Tata Kelola Obat Bahan Alam Tahun 2025	42
Grafik 25 Laporan Rata-Rata Nilai Tata Kelola Suplemen Kesehatan Tahun 2025	42
Grafik 26 Profil Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memperoleh Sertifikat CPOBAB Tahun 2020-2025	54
Grafik 27 Profil Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB Secara Bertahap Tahun 2020-2025.....	55
Grafik 28 Profil SKI dan SKE Obat Bahan Alam yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2020- 2025.....	56
Grafik 29 Profil SKI dan SKE Obat Kuasi yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2020-2025	58
Grafik 30 Profil SKI dan SKE Suplemen Kesehatan yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2020-2025	59
Grafik 31 Profil SAS yang Diterbitkan oleh BPOM tahun 2020-2025	61

BAB 1

Pendahuluan

1. Gambaran Umum Institusi

a. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Unit Kerja

Berdasarkan peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan berkontribusi aktif dalam pencapaian tujuan organisasi dengan visi, misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Misi

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Sediaan usaha Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Budaya Organisasi

Badan POM memiliki 6 (enam) budaya kerja yang disingkat dalam akronim PIKKIR, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Profesional, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi;
2. Integritas, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan;
3. Kredibilitas, dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional;
4. Kerjasama Tim, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik;
5. Inovatif, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini;
6. Responsif/Cepat Tanggap, antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

b. Struktur Organisasi dan Tupoksi

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan;

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan; dan
- Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Struktur organisasi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1 Struktur organisasi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

BAB 2

Pengelolaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melakukan pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, diperlukan SDM yang mencukupi dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensi sesuai kebutuhan. Jumlah SDM yang dimiliki Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan komposisi sebagai berikut :

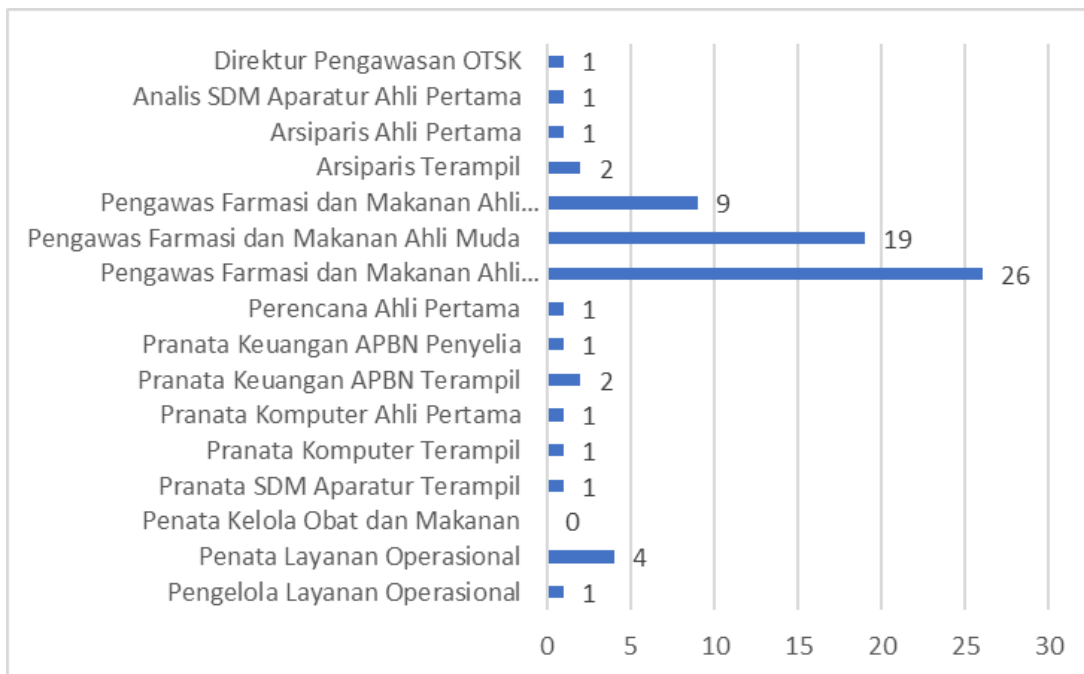
No	Strata Pendidikan	Jumlah		
		PNS	CPNS	PPPK
1	S2	11	0	0
2	Profesi	16	0	4
3	S1	11	13	9
4	D3	4	0	3
5	SMP Sederajat	0	0	0
Total		42	13	16

Tabel 1 Jumlah SDM yang dimiliki Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan memberikan kesempatan kepada SDM nya untuk mengikuti Tugas Belajar.

Data Pegawai berdasarkan Jabatan

Pada tahun 2025, jumlah terbesar pegawai dengan jabatan fungsional tertentu dan pejabat struktural di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan berdasarkan jabatan sebagaimana tercantum dalam grafik di bawah ini:



Grafik 1 Data Pegawai berdasarkan Jabatan

Data Kebutuhan Pegawai

Agar organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, diperlukan kompetensi SDM sesuai dengan bidang tugasnya agar mampu berkinerja baik. Untuk itu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan harus senantiasa memperhatikan peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan melalui capacity building yang terencana.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2025, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan jumlah ideal pegawai yaitu 97 orang, kondisi saat ini jumlah pegawai 71 orang masih ada kekurangan SDM sejumlah 26 orang.

Peningkatan kompetensi

Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawai Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia serta

mendukung transformasi kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini juga mendukung area perubahan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pelaksanaan roadmap penataan SDM aparatur. Berikut merupakan rincian agenda pengembangan kompetensi yang diselenggarakan baik oleh internal maupun eksternal Badan POM dan diikuti oleh pegawai selama tahun 2025:

No	Jenis pengembangan kompetensi	Peserta
1	Bimbingan Teknis Digital Marketing, Social Media Research, Artificial Intelligence dan Big Data Bagi Petugas Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	55
2	Bimbingan Teknis CPOTB Topik Khusus	30
3	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Management Officer (QRMO)	2
4	Bimbingan Teknis Penguatan Petugas Badan POM dalam Penanganan Pemberantasan Obat Bahan Alam (OBA) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Hulu Hilir	51
5	Bimbingan Teknis Upgrading Competency Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Bagi Petugas UPT BPOM	60
6	Workshop Implementasi Monitoring Efek Samping Obat Herbal dan Suplemen Kesehatan bagi Penanggung jawab (PIC) di UNit Teknis BPOM dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Keamanan Produk	17
7	Bimbingan Teknis Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	40
8	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	71

Tabel 2 pegawai Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

2. Sarana dan Prasarana

Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menempati Gedung Bhineka Tunggal Ika lantai 2.

Dalam melaksanakan tugas telah didukung sarana dan prasarana antara lain:

- a. Ruang kerja yang terdiri dari Ruang Direktur, Ruang Pegawai dan *employee coner*

- b. Peralatan, mebeulair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas
- c. Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan serta administrasi.

3. Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Total anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada tahun 2025 adalah Rp9.837.205.000 (sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan pagu blokir sebesar Rp3.123.019.000 (tiga milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.122.981.862 (tiga milyar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), setara 31.75% dari pagu anggaran atau 100.00% dari pagu blokir

b. Penerimaan PNB

Penerimaan PNB tahun 2025 sebesar Rp1.740.200.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).

4. Implementasi PUGIS

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan merupakan bagian dari komitmen unit kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif gender, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan PUG mengacu pada berbagai regulasi dan kebijakan, antara lain:

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Keputusan Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024.
2. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.21.07.13.3789 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penanganan Responsif Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.08.21.315 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.02.01.2.21.04.22.13 Tahun 2022 tentang Penyediaan Data Terpilah pada Kegiatan di Lingkungan BPOM.
5. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.01.23.03 Tahun 2023 tentang Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Sensorik dalam Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor HK.02.01.2.21.03.21.07 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Data Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
7. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.10.23.134 Tahun 2023 tentang Penunjukan Gender Champion dalam rangka Pelaksanan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
8. Keputusan Kepala BPOM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
9. Keputusan Kepala Biro Perencanaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.02.25.13 Tahun 2025 tentang Rencana Kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025.
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 415 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan.
11. Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.01.25.07 Tahun 2025 tentang Rencana Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.
12. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik HK.02.02.4.10.25.374 Tahun 2025 tentang Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Penerapan PUG bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan di lingkungan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah mempertimbangkan perspektif gender dan kebutuhan kelompok rentan. Dengan demikian, kebijakan dan layanan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat yang setara, meningkatkan aksesibilitas pelayanan, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja dan pelayanan publik yang inklusif.

Sebagai bentuk komitmen implementasi PUG, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah membentuk dan menugaskan Sub Pokja PUG di lingkungan unit kerja. Sub Pokja tersebut berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan PUG, mendorong integrasi perspektif gender dalam program dan kegiatan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG secara berkelanjutan. Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat implementasi PUG secara konsisten dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang responsif gender di lingkungan Badan POM.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui integrasi perspektif gender dalam 7 (tujuh) tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta penguatan kelembagaan. Implementasi tersebut dilakukan antara lain melalui penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP), pengembangan Gender Budget Statement (GBS), pemanfaatan data terpilah, serta penguatan kapasitas SDM dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi kegiatan.

Melalui pendekatan ini, setiap kebijakan dan program tidak hanya disusun untuk mencapai efektivitas teknis, tetapi juga mempertimbangkan secara terukur kebutuhan, pengalaman, serta potensi perbedaan dampak yang dapat dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Implementasi tersebut didukung melalui pemanfaatan data terpilah dan analisis gender dalam proses perencanaan program, sehingga kebijakan dan kegiatan yang disusun dapat lebih responsif, inklusif, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Berdasarkan data responden Hasil Survei Kepuasan

Masyarakat tahun 2025 menunjukkan bahwa pengguna layanan dengan karakteristik sebagai berikut :

No	Karakteristik	Indikator	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	27,39%
		Perempuan	72,61%
2	Pendidikan	≤ SMA/Sederajat	1,91%
		DI/D2/D3	10,83%
		S1	34,39%
		S2/Profesi/S3	52,87%
3	Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	0%
		Pegawai Swasta	94,90%
		Pegawai BUMN/D	1,27%
		Wiraswasta	0,64%
		Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan	0%
		Pelajar/Mahasiswa	1,91%
		Lainnya	1,27%
4	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	100%
		Disabilitas	0%

Tabel 3 data responden Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025

Dari analisis data tersebut, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen kesehatan mengintegrasikan perspektif PUG dalam penetapan rincian output yang ditagging sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu

yang sebelumnya Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan namun di perjalanan tahun 2025 RO tersebut direvisi menjadi Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan. RO ini fokuskan pada peningkatan akses dan pengetahuan pelaku usaha terhadap pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

Berikut ini adalah tabel anggaran pada RO yang ditagging sebagai ARG dan perbandingannya dengan total pagu tahun 2025:

No	Rincian Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%ARG terhadap total anggaran
1	Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan	1,908,045,000	1,908,025,114	100%

Tabel 4 Tabel Anggaran Pada RO

Internalisasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dilakukan melalui berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya penerapan perspektif gender dan inklusi sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Salah satu bentuk internalisasi yang dilakukan yaitu melalui pertemuan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai unit kerja terkait implementasi PUGIS. Selain itu, seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan juga telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan IDEAS sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan pemahaman implementasi PUGIS di lingkungan kerja.

Implementasi PUGIS dalam pelaksanaan kegiatan unit kerja telah diterapkan melalui pemanfaatan data terpilah sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan langkah, program, maupun pengambilan kebijakan. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat secara lebih adil, inklusif, dan responsif.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Layanan Aksesibilitas Digital

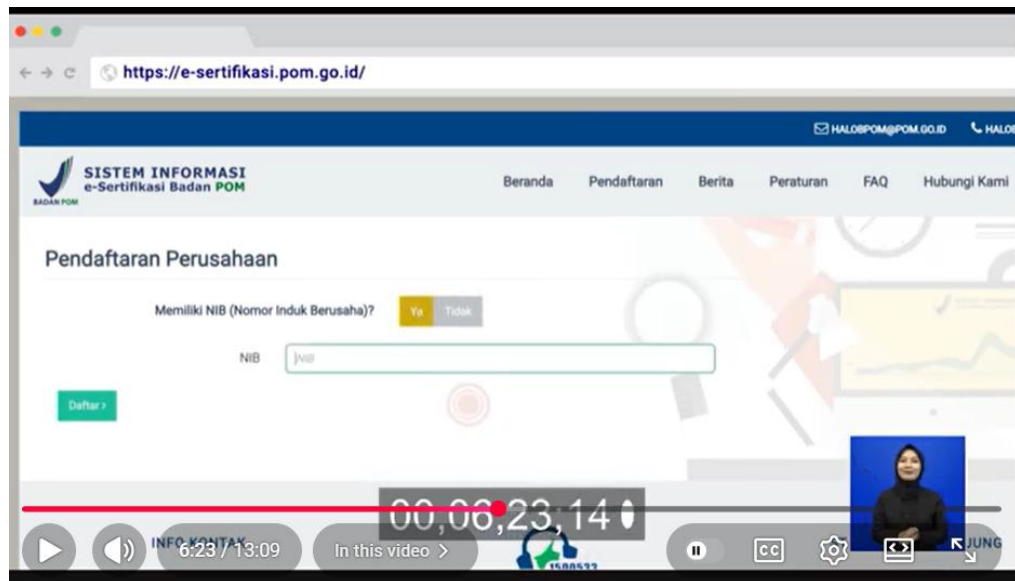
Pada website BPOM telah disediakan akses khusus yang ramah dan mudah diakses bagi kelompok rentan guna memastikan terpenuhinya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan.



Gambar 2 Layanan Aksesibilitas Digital Bagi Kelompok Rentan

Selain itu, di beberapa layanan informasi yang tersedia di Area layanan publik Direktorat Pengawasan OTSK menyediakan video dengan fitur bahasa isyarat Indonesia (BISINDO). Kehadiran juru bahasa isyarat dalam video konten edukasi bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diakses oleh penyandang disabilitas tunarungu/tuli.





Gambar 3 Layanan Akseibilitas Digital video dengan fitur bahasa isyarat Indonesia (BISINDO)

Tersedia juga bahan informasi media cetak berupa leaflet yang telah mengakomodir huruf braille. Leaflet ini ditujukan khusus bagi penyandang tuna netra agar mereka tetap dapat mengakses informasi penting terkait dengan pengawasan OT dan SK





Gambar 4 Layanan Akseibilitas Digital informasi media cetak berupa leaflet dan huruf braille

2. Penyediaan Layanan Prioritas bagi Kelompok Rentan

Unit kerja menyediakan layanan prioritas yang ramah dan mudah diakses bagi kelompok rentan guna memastikan terpenuhinya hak atas pelayanan yang setara dan inklusif. Berdasarkan data jumlah responden tahun 2025 tidak ada penerima layanan kelompok rentan. Selain itu, gedung pelayanan publik juga telah didukung dengan fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan untuk meningkatkan kenyamanan, kemudahan akses, dan keamanan dalam memperoleh layanan.

- a. Area parkir khusus untuk pelanggan prioritas



Gambar 5 Area parkir khusus untuk pelanggan prioritas

- b. Jalur Pemandu ke arah ruang layanan dan jalur landai





Gambar 6 Jalur Pemandu ke arah ruang layanan dan jalur landai

c. Ruang tunggu area prioritas



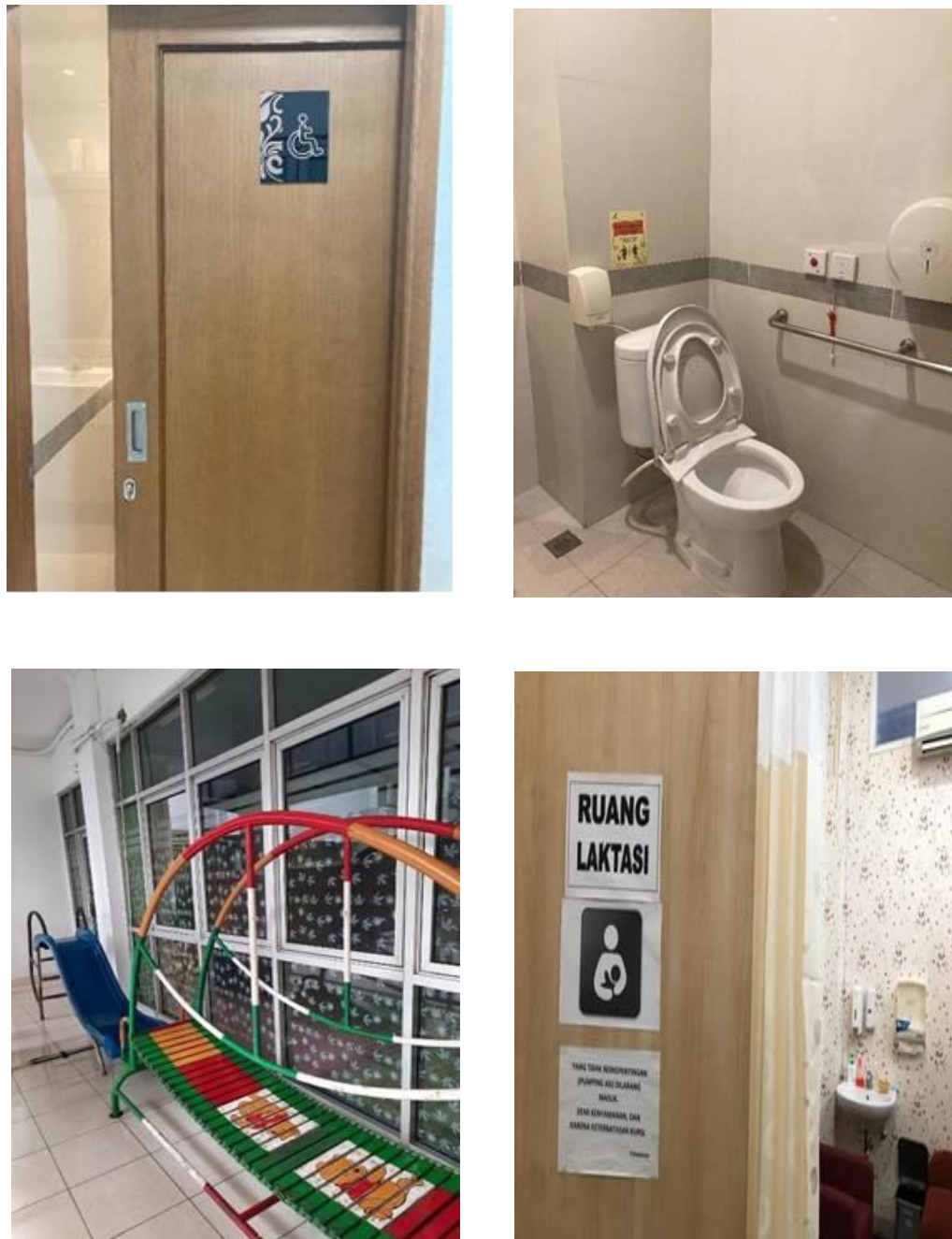
Gambar 7 Ruang tunggu area prioritas

d. Loker Prioritas



Gambar 8 Loker Prioritas

e. Sarana Penunjang lain

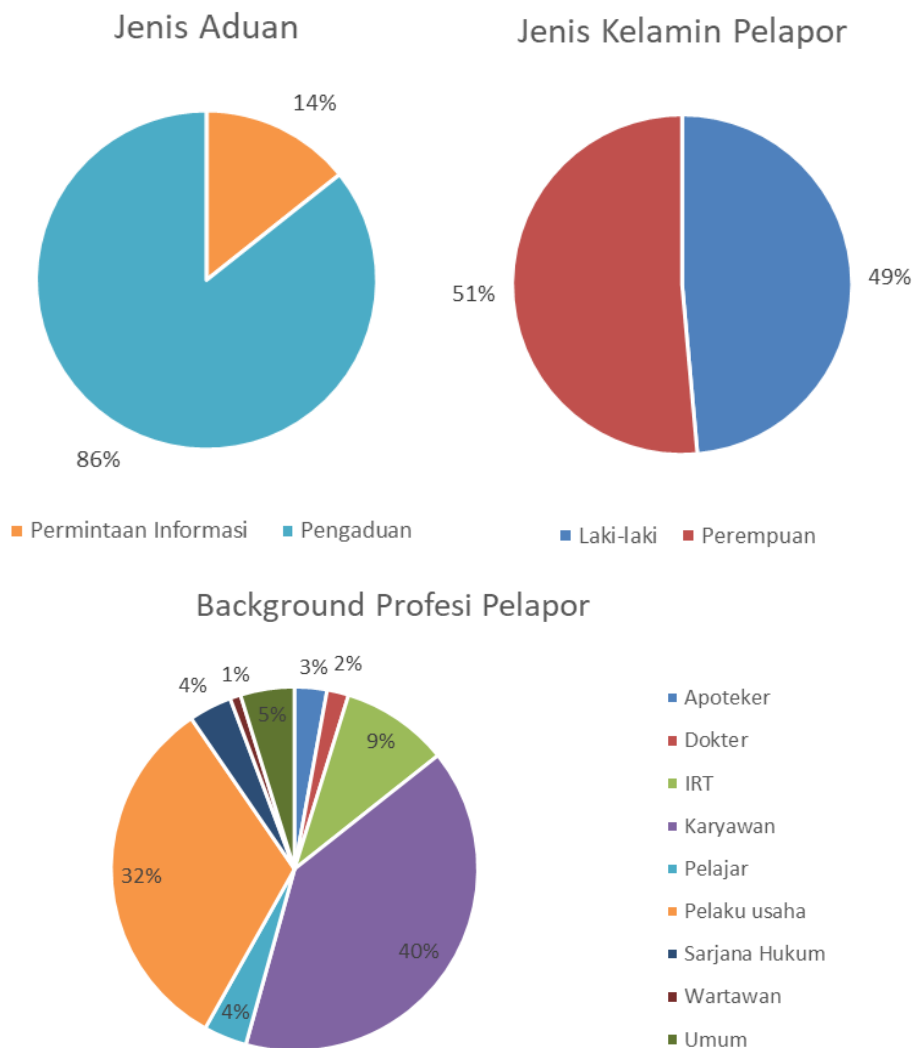


Gambar 9 Sarana Penunjang lain

3. Profile pengaduan kasus berdasarkan data terpilah

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menerima sebanyak 105 pengaduan. Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku secara responsif, setara, objektif, dan tidak diskriminatif. Hal

ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan pengaduan telah memperhatikan prinsip PUGIS, yaitu memastikan akses layanan dan tindak lanjut pengaduan yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat.



Grafik 2 Profile pengaduan kasus berdasarkan data terpilah

4. Tindaklanjut kasus temuan produk Obat Bahan alam dan Suplemen Kesehatan

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang responsif terhadap prinsip PUGIS, kegiatan sampling Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan dilakukan secara berbasis risiko dengan mempertimbangkan kategori produk, riwayat temuan, serta potensi dampak kesehatan pada kelompok pengguna tertentu. Sampling difokuskan pada kategori produk berisiko tinggi, antara lain produk dengan klaim stamina pria/ sehat pria/ seks, produk pegal linu/ encok/ asam urat/ rematik, serta produk pelangsing/

penurun kadar lemak/ singset/ diet. Ketiga kategori tersebut menjadi prioritas karena memiliki riwayat temuan Bahan Kimia Obat (BKO) yang relatif tinggi dan digunakan oleh kelompok masyarakat yang berbeda, seperti laki-laki dewasa, perempuan, pekerja aktif, lanjut usia, maupun kelompok rentan lainnya.

Selama tahun 2025, telah dilakukan tindak lanjut terhadap 188 sampel OBA tanpa izin edar mengandung BKO berupa pembersihan pasar, penelusuran ke fasilitas distribusi, serta publik warning. Hal tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan memperhatikan kesetaraan perlindungan kesehatan bagi seluruh kelompok masyarakat sesuai prinsip PUGIS.

BAB 3

Hasil Kegiatan

Sebelum melanjutkan ke pembahasan, perlu kami informasikan bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelafalan "obat tradisional" telah diubah menjadi "obat bahan alam". Namun, dalam laporan ini, kami masih menggunakan istilah "obat tradisional" ketika merujuk pada struktur organisasi dan nama industri. Oleh karena itu, kami berharap perbedaan tersebut tidak menyebabkan kebingungan bagi pembaca dalam memahami laporan ini.

SK.1 Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

1. Inspeksi komprehensif dalam rangka tindak lanjut pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan berbasis risiko

Obat Bahan Alam

- Pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi obat bahan alam
Dalam rangka pemastian mutu, keamanan dan khasiat produk obat bahan alam, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pemeriksaan penerapan aspek cara pembuatan yang baik terhadap sarana produksi, yaitu:
 - a. Dari 144 sarana Industri Obat Bahan Alam (IOBA) di Indonesia, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (35,42%) sarana IOBA. Dari hasil pemeriksaan, 46 (90,20%) sarana memenuhi ketentuan sedangkan 5 (9,80%) sarana tidak memenuhi ketentuan.
 - b. Dari 20 sarana Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) di Indonesia, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (20%) sarana dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 4 (100%) sarana memenuhi ketentuan.
 - c. Dari 774 sarana Usaha Kecil Obat Bahan Alam (UKOBA) di Indonesia, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 167 (21,58%) sarana dengan hasil pemeriksaan menunjukkan 96 (57,49%) sarana UKOBA memenuhi

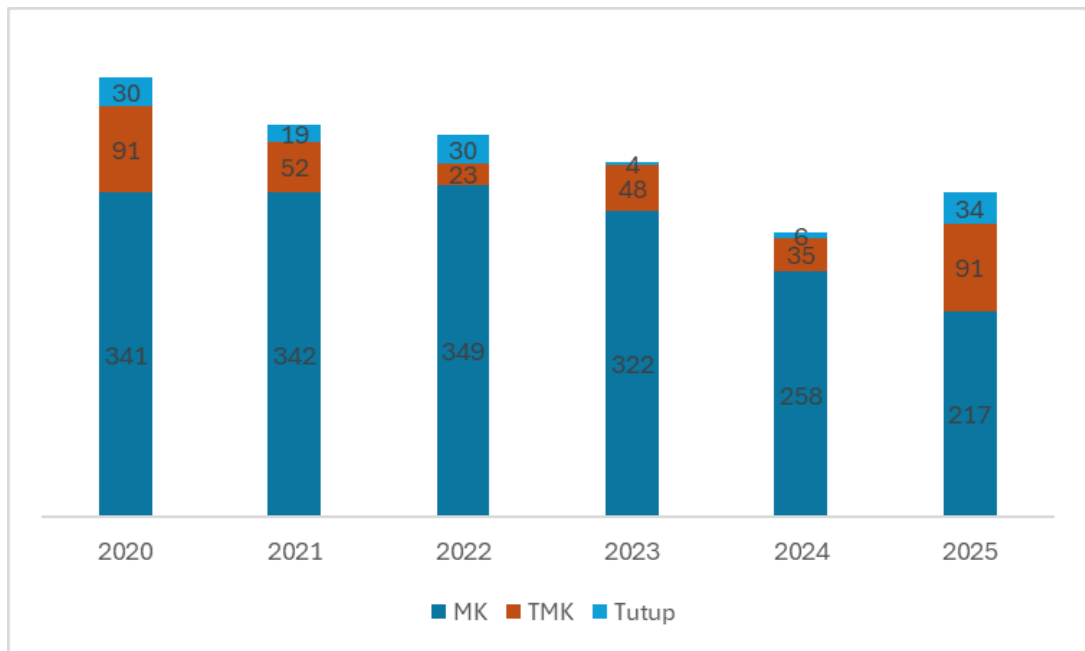
ketentuan, 56 (33,53%) sarana UKOBA tidak memenuhi ketentuan, dan 15 (8,98%) sarana UKOBA lainnya tutup/tidak aktif.

- d. Dari 361 sarana Usaha Mikro Obat Bahan Alam (UMOBA) di Indonesia telah dilakukan pemeriksaan terhadap 117 (32,41%) sarana dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 70 (59,83%) sarana UMOBA memenuhi ketentuan, 30 (25,64%) sarana UMOBA tidak memenuhi ketentuan dan 19 (16,24%) sarana UMOBA sudah tutup/tidak aktif.

Feedback yang diberikan kepada pelaku usaha dapat berupa surat peringatan bagi sarana produksi yang TMK atau pembinaan berkelanjutan bagi sarana produksi yang MK. Terhadap semua temuan selama pemeriksaan sarana produksi, pelaku usaha harus membuat tindakan perbaikan dan pencegahan atau biasa disebut sebagai Corrective Action and Preventive Action (CAPA) hingga seluruh temuan berstatus closed. Apabila pelaku usaha kesulitan dalam pemenuhan CAPA maka dapat dilakukan pendampingan melalui kegiatan desk CAPA. Pelaku usaha dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk bertanya terkait bagaimana memahami temuan dan bagaimana membuat perbaikan yang tepat. Pada akhirnya temuan dapat diclosed lebih cepat. Selain itu apabila terdapat fasilitas produksi yang memproduksi obat bahan alam mengandung bahan kimia obat maka selain diminta perbaikan juga diberikan sanksi tegas termasuk di antaranya adalah pemusnahan produk yang terbukti mengandung bahan kimia obat (BKO).

Apabila ditemukan produk tanpa izin edar di fasilitas produksi UMKM maka selain diberikan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut maka Terhadap temuan produk tanpa izin edar, dilakukan pembinaan teknis kepada pelaku usaha untuk proses pendaftaran produk.

Selain terkait pemenuhan CPOBAB, belakangan ini terdapat modus pelaku usaha umumnya UMKM yang mendaftarkan produknya dalam jumlah besar. Petugas Badan POM saat ini telah menyampaikan kepada pelaku usaha bahwa Jika dalam waktu satu tahun sejak produk terdaftar masih belum dilakukan produksi atau selama dua tahun berturut-turut tidak dilakukan produksi, maka izin edar produk obat bahan alam tersebut dibatalkan.

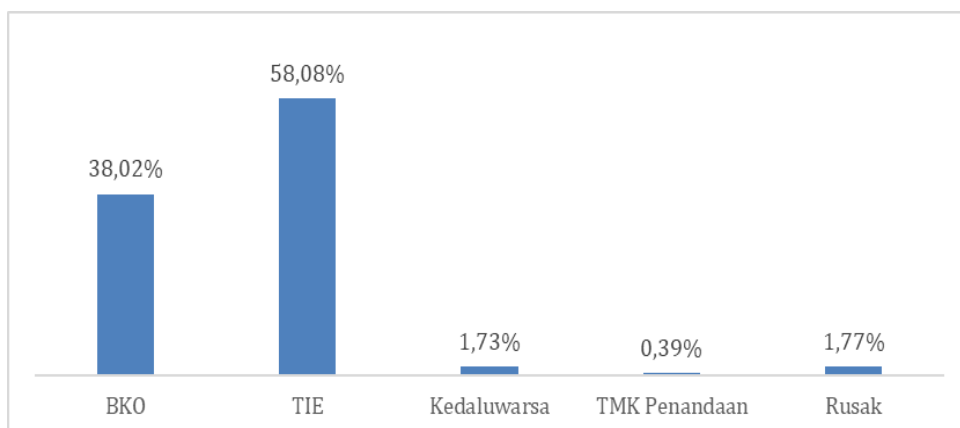


Grafik 3 Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Bahan Alam Tahun 2020-2025

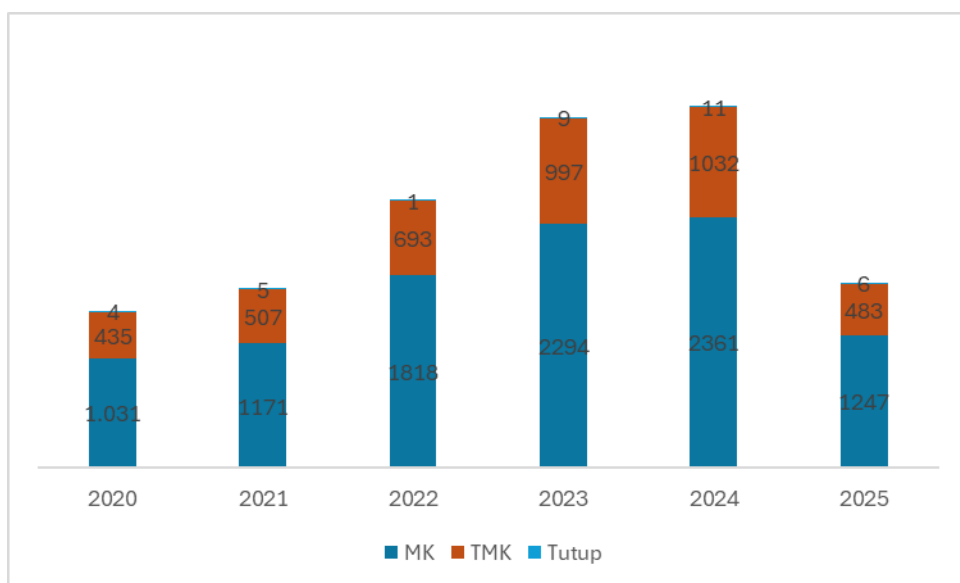
Pada data grafik 1 tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah sarana produksi OBA yang tidak memenuhi ketentuan. Adapun TMK sarana produksi OBA di dominasi oleh:

- Masa berlaku sertifikat CPOBAB telah habis /tidak punya sertifikat CPOBAB; dan
- Penerapan CPOBAB yang tidak memenuhi ketentuan.

Pengawasan terhadap fasilitas distribusi juga telah dilakukan selama tahun 2025. Sebanyak 1793 fasilitas distribusi obat bahan alam telah diperiksa dengan hasil 1294 (72,17%) sarana distribusi MK, 493 (27,50%) sarana distribusi TMK, dan 6 (0,33%) sarana tutup. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut pengamanan, pemusnahan produk, peringatan, peringatan keras, dan pro justisia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan obat bahan alam ilegal yang ditindaklanjuti dengan pemusnahan selama tahun 2025 berjumlah 158.562 pieces dengan perkiraan nilai ekonomi sebesar Rp Rp. 1.871.359.535



Grafik 4 Profil Temuan Produk pada Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

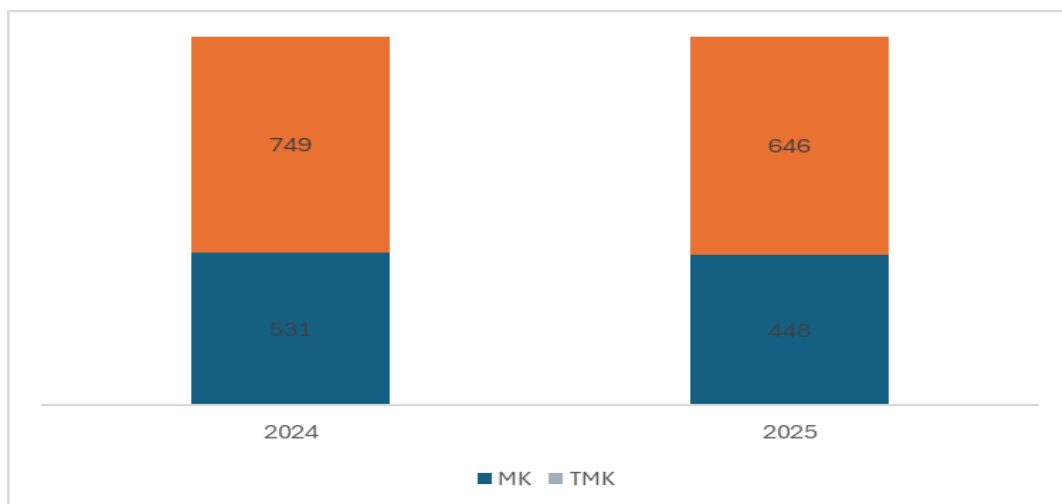


Grafik 5 Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam 2020-2025

Dari Grafik 3 dapat dilihat bahwa jumlah sarana distribusi Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Kondisi tersebut sejalan dengan pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (OBA dan SK) yang dilaksanakan secara lebih intensif, terarah, dan berbasis risiko.

Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan Intensifikasi Pengawasan OBA dan SK. Jenis sarana yang diperiksa mayoritas berupa Depot Jamu/Pengecer, namun terdapat juga sarana distribusi lain yaitu agen, distributor, sarana pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif, Stokist MLM, Toko Obat/Swalayan dan sarana lain-lain. Sebanyak 1094 sarana telah diperiksa dengan hasil 448 (40,95%) sarana memenuhi ketentuan dan 646 (59,05%)

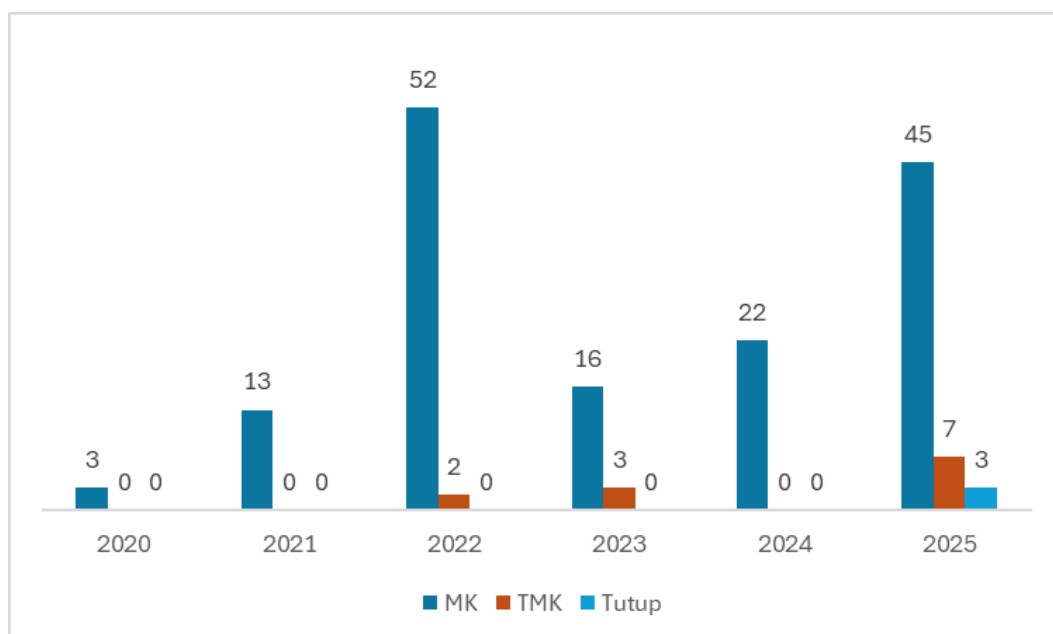
sarana tidak memenuhi ketentuan. Temuan obat bahan alam mengandung BKO dan/atau ilegal hasil intensifikasi pengawasan tahun 2025 berjumlah 138.927 pcs dengan nilai keekonomian Rp. 1.381.621.376.



Grafik 6 Profil Pemeriksaan Intensifikasi Pengawasan OBA Tahun 2024-2025

Suplemen Kesehatan

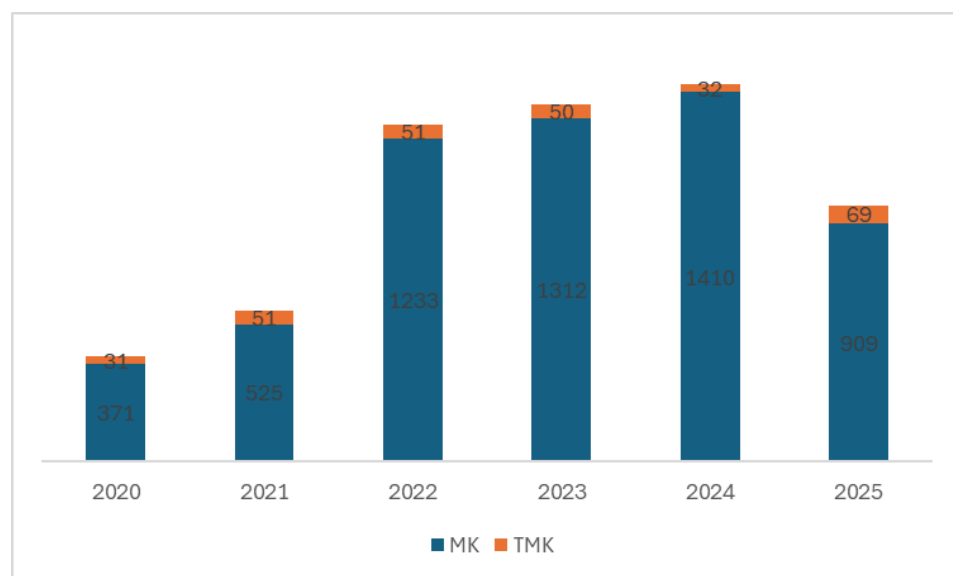
Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 55 sarana produksi suplemen kesehatan dengan hasil 45 (81,82%) sarana memenuhi ketentuan, 7 (12,73%) sarana tidak memenuhi ketentuan dan 3 (0,055%) sarana tutup.



Grafik 7 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan 2020-2025

Pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan dilakukan pada sarana produksi industri farmasi, sarana produksi IOT dan sarana produksi pangan.

Untuk sarana distribusi suplemen kesehatan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 977 sarana berdasarkan analisis risiko dengan hasil 909 (93%) sarana distribusi MK, 69 (7%) sarana TMK. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut pengamanan, pemusnahan produk, peringatan, peringatan keras dan pro justisia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan suplemen kesehatan ilegal di fasilitas distribusi yang telah ditindaklanjuti dengan pemusnahan sebanyak 4.265 pieces dengan perkiraan nilai total Rp 550.824.650



Grafik 8 Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2020-2025

Dari Grafik 6 terlihat bahwa jumlah saran distribusi Suplemen Kesehatan yang Tidak Memenuhi Ketentuan mengalami peningkatan. Peningkatan sarana distribusi SK yang TMK disebabkan karena pelaku usaha melakukan pembelian produk pada sumber yang tidak resmi serta kurangnya pemahaman dalam melakukan pengelolaan produk Suplemen Kesehatan. Selain itu, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk yang terdaftar mengakibatkan permintaan produk tanpa izin edar tetap ada.

2. Sampling dan pengujian laboratorium Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi

1. Tren hasil pelaksanaan sampling dan pengujian OBA, SK dan OK Tahun 2020 - 2025

Tahun	Metode Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang Diperiksa Sesuai Standar	Jenis TMS				Total TMS	MS
				TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMS Uji Laboratorium		
2020	Random	7.009	6.585	2	0	0	182	184	6.401
	Targeted	2.731	2.689	13	0	1	136	150	2.539
	Total	9.740	9.274	15	0	1	318	334	8.940
2021	Random	7.901	6.697	26	2	0	290	318	6.379
	Targeted	3.743	3.245	24	2	1	232	259	2.986
	Total	11.644	9.942	50	4	1	522	577	9.365
2022	Random	9.120	8.916	11	4	0	329	344	8.572
	Targeted	3.922	3.799	9	3	0	264	276	3.523
	Total	13.042	12.715	20	7	0	593	620	12.095
2023	Random	8.815	8.496	2	12	0	314	328	8.168
	Targeted	3.817	3.748	7	3	0	193	203	3.545
	Total	12.632	12.244	9	15	0	507	531	11.713
2024	Random	8.803	8.780	5	9	0	438	452	8.328
	Targeted	3.819	3.819	1	5	0	274	280	3.539
	Total	12.622	12.599	6	14	0	712	732	11.867
2025	Targeted	8.690	8.686	170	7	1	983	1.161	7.525

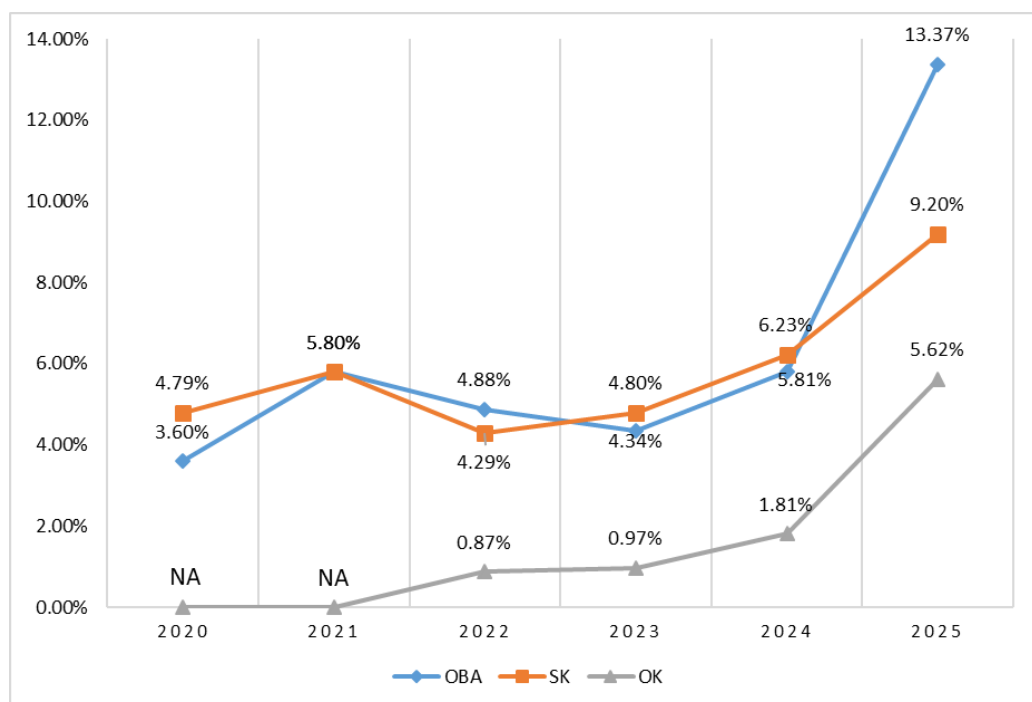
Tabel 5 Data Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam tahun 2020 – 2025

Tahun	Metode Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang Diperiksa Sesuai Standar	Jenis TMS				Total TMS	MS
				TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMS Uji Laboratorium		
2020	Random	2.833	2.687	0	0	0	135	135	2.552
	Targeted	446	401	2	0	0	11	13	388
	Total	3.279	3.088	2	0	0	146	148	2.940
2021	Random	2.626	1.823	2	0	0	118	120	1.703
	Targeted	1.274	968	8	1	0	33	42	926
	Total	3.900	2.791	10	1	0	151	162	2.629
2022	Random	2.434	2.360	0	5	1	99	105	2.255
	Targeted	1.053	977	1	1	0	36	38	939
	Total	3.487	3.337	1	6	1	135	143	3.194
2023	Random	2.347	2.284	4	4	0	105	113	2.171
	Targeted	1.034	1.009	1	2	0	42	45	964
	Total	3.381	3.293	5	6	0	147	158	3.135
2024	Random	2.408	2.394	0	6	0	158	164	2.230
	Targeted	1.035	1.027	0	3	0	46	49	978
	Total	3.443	3.421	0	9	0	204	213	3.208
2025	Targeted	2.360	2.359	35	2	0	180	217	2.142

Tabel 6 Data Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan tahun 2020 – 2025

Tahun	Metode Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang Diperiksa Sesuai Standar	Jenis TMS				Total TMS	MS
				TIE/ Ilegal/ Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMS Uji Laboratorium		
2022	Random	606	571	0	1	0	4	5	566
	Targeted	258	235	0	0	0	2	2	233
	Total	864	806	0	1	0	6	7	799
2023	Random	590	563	0	0	0	3	3	560
	Targeted	264	260	0	0	0	5	5	255
	Total	854	823	0	0	0	8	8	815
2024	Random	624	624	0	0	0	13	13	611
	Targeted	262	262	0	1	0	2	3	259
	Total	886	886	0	1	0	15	16	870
2025	Targeted	606	605	8	0	0	26	34	571

Tabel 7 Data Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Obat Kuasi tahun 2022 - 2025



Grafik 9 Tren Pengujian Tidak Memenuhi Syarat produk Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi tahun 2020-2025

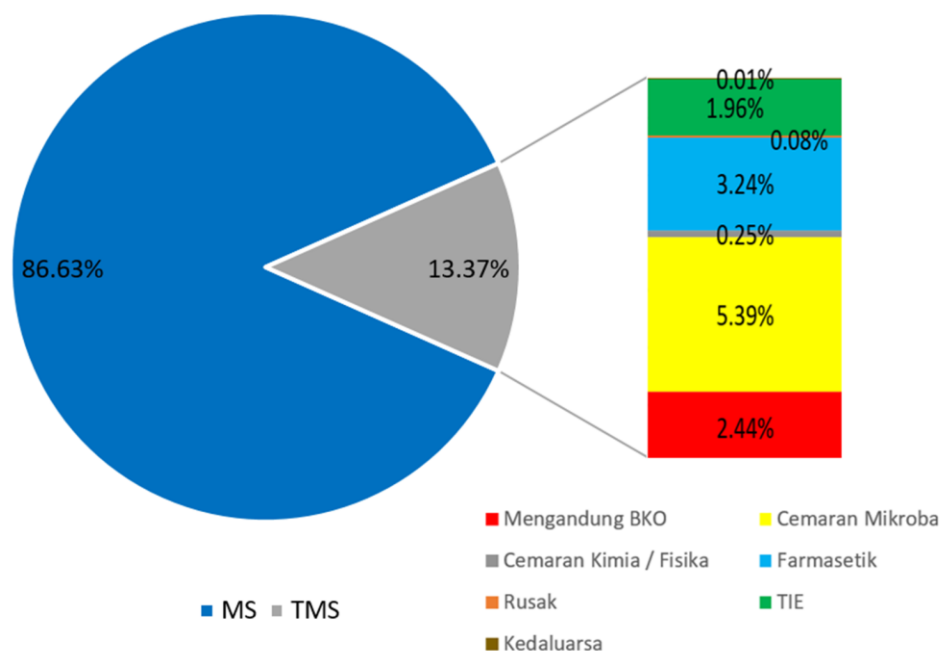
Dari grafik diatas, dapat terlihat Peningkatan persentase Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahun 2025 terjadi karena adanya perubahan metode sampling dari kombinasi acak targeted menjadi targeted seluruhnya. Perubahan metode sampling ini menyebabkan terjadinya peningkatan angka TMS produk secara signifikan, namun hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan lebih tajam dan efektif dalam menjaring produk berisiko, bukan mengindikasikan penurunan kualitas produk di pasaran secara keseluruhan. Pelaksanaan sampling dan pengujian Obat Kuasi

barudilakukan pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengkategorikan obat kuasi ke dalam sediaan farmasi.

2. Hasil pelaksanaan sampling dan pengujian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi tahun 2025

Obat Bahan Alam

Dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan obat bahan alam yang beredar, selama tahun 2025 telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 8.686 sampel obat bahan alam. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa 7.525 (86,63%) sampel MS dan 1.161 (13,37%) sampel TMS. Dari total temuan TMS tersebut, hasil pengujian menunjukkan bahwa pelanggaran didominasi oleh Cemarannya Mikroba sebesar 5,39%, disusul oleh Farmasetik sebesar 3,24%, dan temuan Bahan Kimia Obat (BKO) sebesar 2,44%.

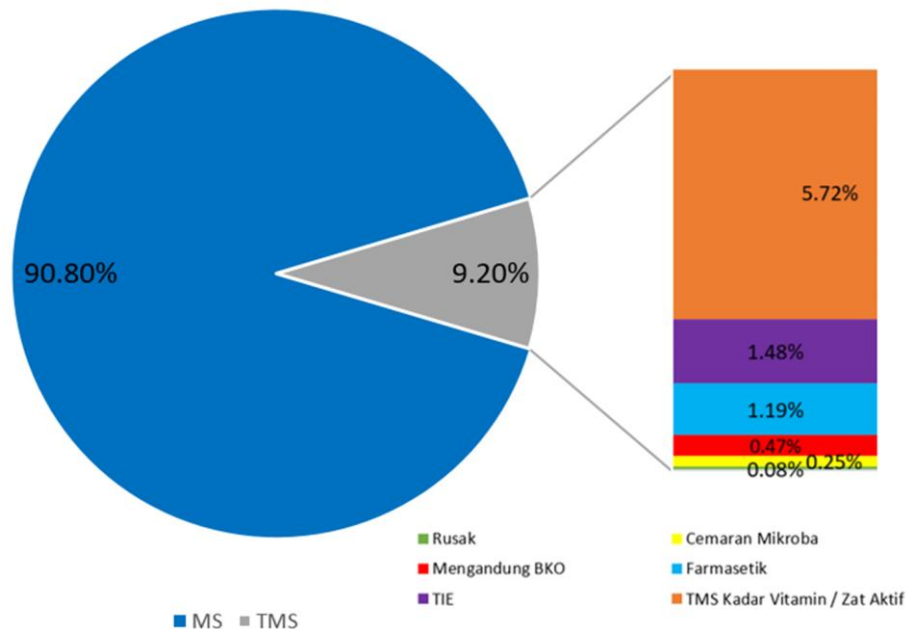


Grafik 10 Profil Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Bahan Alam Tahun 2025

Suplemen Kesehatan

Selama tahun 2025, telah dilakukan sampling dan pengujian laboratorium terhadap 2.359 sampel suplemen kesehatan dari peredaran. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan 2.142 (90,80%) sampel MS dan 217 (9,20%)

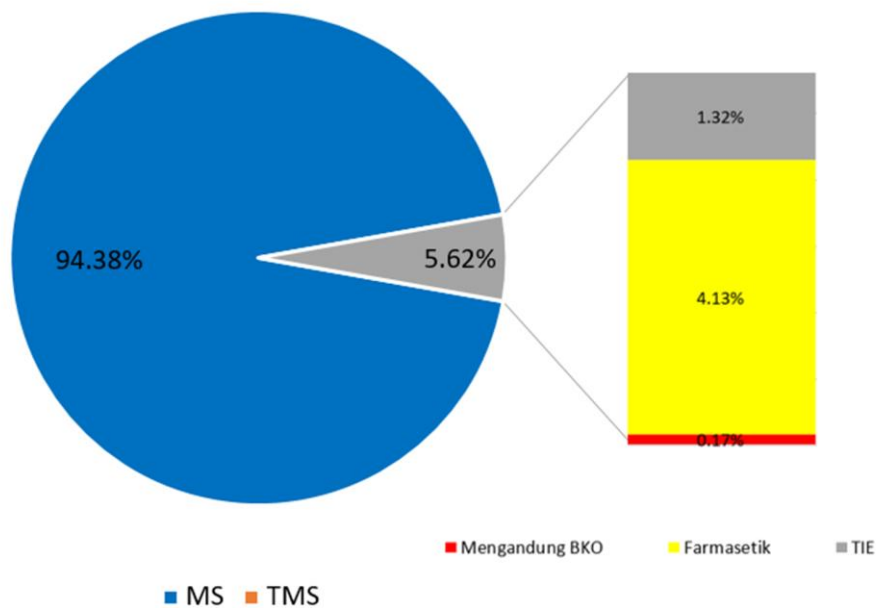
sampel TMS. Data TMS tersebut didominasi hasil pengujian Kadar Zat Aktif/ Vitamin yang tidak memenuhi syarat sebesar 5,72%, Suplemen Kesehatan Tanpa Izin Edar sebesar 1,48% dan Farmasetik sebesar 1,19%.



Grafik 11 Profil Sampling dan Pengujian Laboratorium Suplemen Kesehatan Tahun 2025

Obat Kuasi

Selama tahun 2025 telah dilakukan *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap 605 sampel obat kuasi dari peredaran. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan 571 (94,38%) sampel MS dan 34 (5,62%) sampel TMS. Data TMS menunjukkan bahwa ketidaksesuaian farmasetik mendominasi sebesar 4,13%, Obat Kuasi Tanpa Izin Edar sebesar 1,32% dan Obat Kuasi mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sebesar 0,17%.



Grafik 12 Profil Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Kuasi Tahun 2025

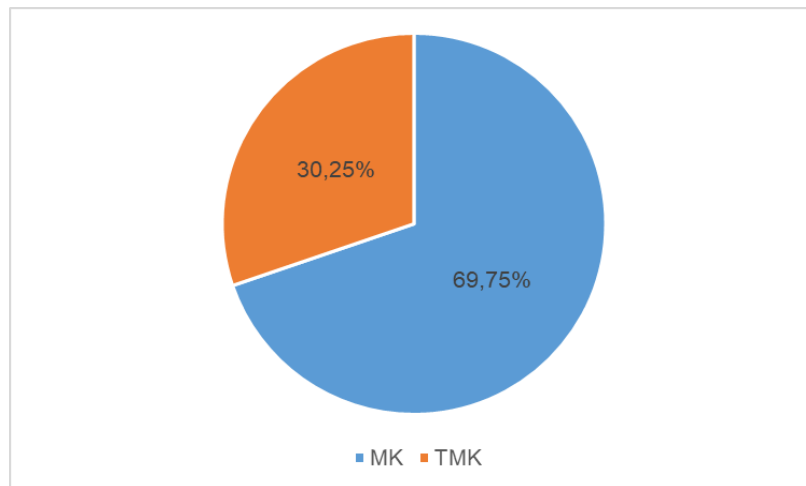
Tindak Lanjut Hasil pelaksanaan sampling dan pengujian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi tahun 2025

Terhadap temuan produk yang tidak memenuhi syarat telah dilakukan pemberian sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, penarikan dan pembersihan produk dari peredaran, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, rekomendasi pembatalan/pencabutan nomor izin edar, pengumuman kepada publik (*public warning*), dan rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

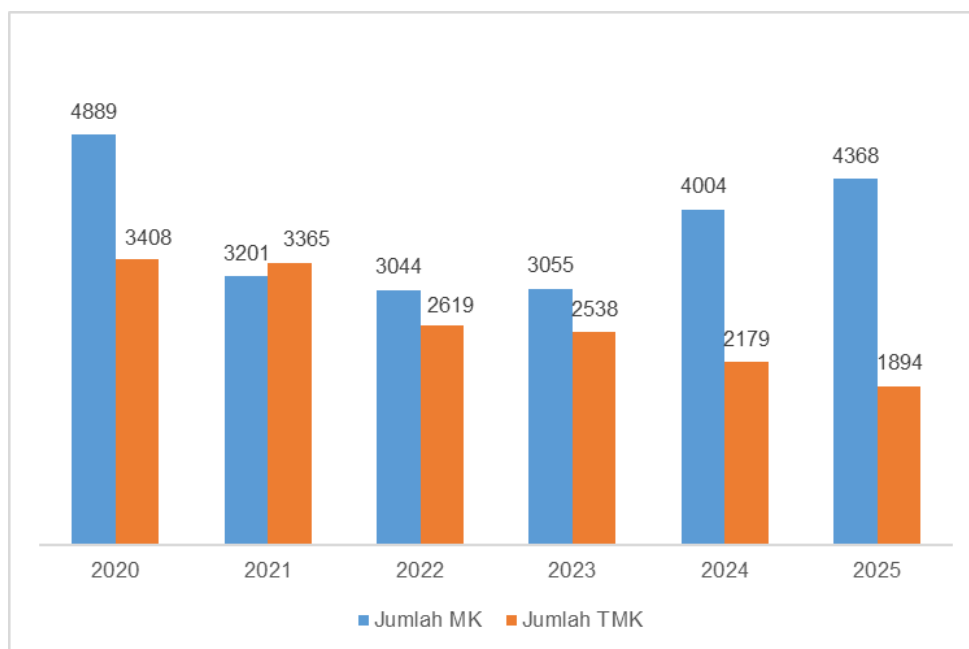
3. Pengawasan iklan dan penandaan obat bahan alam

Pengawasan terhadap iklan dan penandaan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, skema pengawasan iklan dan penandaan obat bahan alam adalah sama, yakni dilakukan oleh UPT Badan POM di seluruh Indonesia dan dilaporkan melalui SIPT. Hasil pengawasan ini kemudian diverifikasi oleh Badan POM Pusat.

Berdasarkan hasil pengawasan iklan obat bahan alam pada tahun 2025, dari 6262 iklan yang diawasi, sejumlah 4368 (69,75%) iklan memenuhi ketentuan (MK) dan sejumlah 1894 (30,25%) iklan obat bahan alam tidak memenuhi ketentuan (TMK)



Grafik 13 Hasil Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Tahun 2025



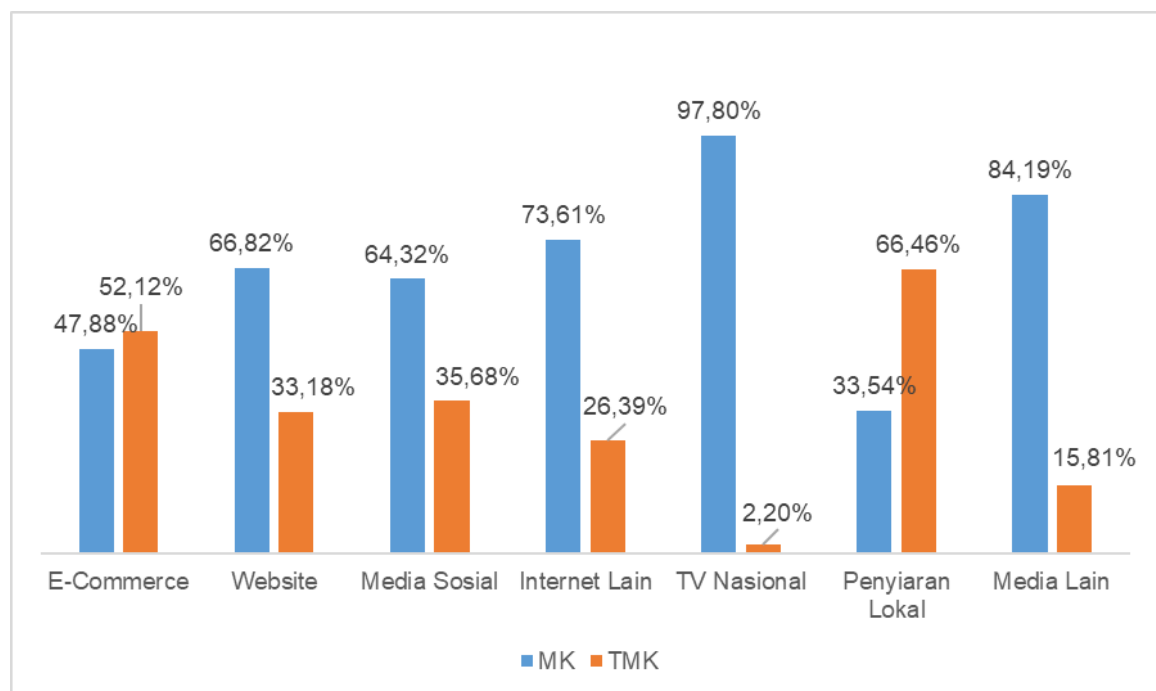
Grafik 14 Tren pengawasan iklan obat bahan alam tahun 2020-2025

Berdasarkan grafik tren pengawasan iklan Obat Bahan Alam, jumlah iklan MK sempat mengalami penurunan pada 2021–2022, namun kembali meningkat secara bertahap sejak 2023 hingga mencapai 4.368 pada tahun 2025. Peningkatan jumlah iklan MK ini menunjukkan adanya perbaikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan, penguatan pembinaan, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan.

Sebaliknya, jumlah iklan TMK secara umum terus menurun dari 3.408 pada tahun 2020 menjadi 1.894 pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pemenuhan ketentuan oleh pelaku usaha, peningkatan

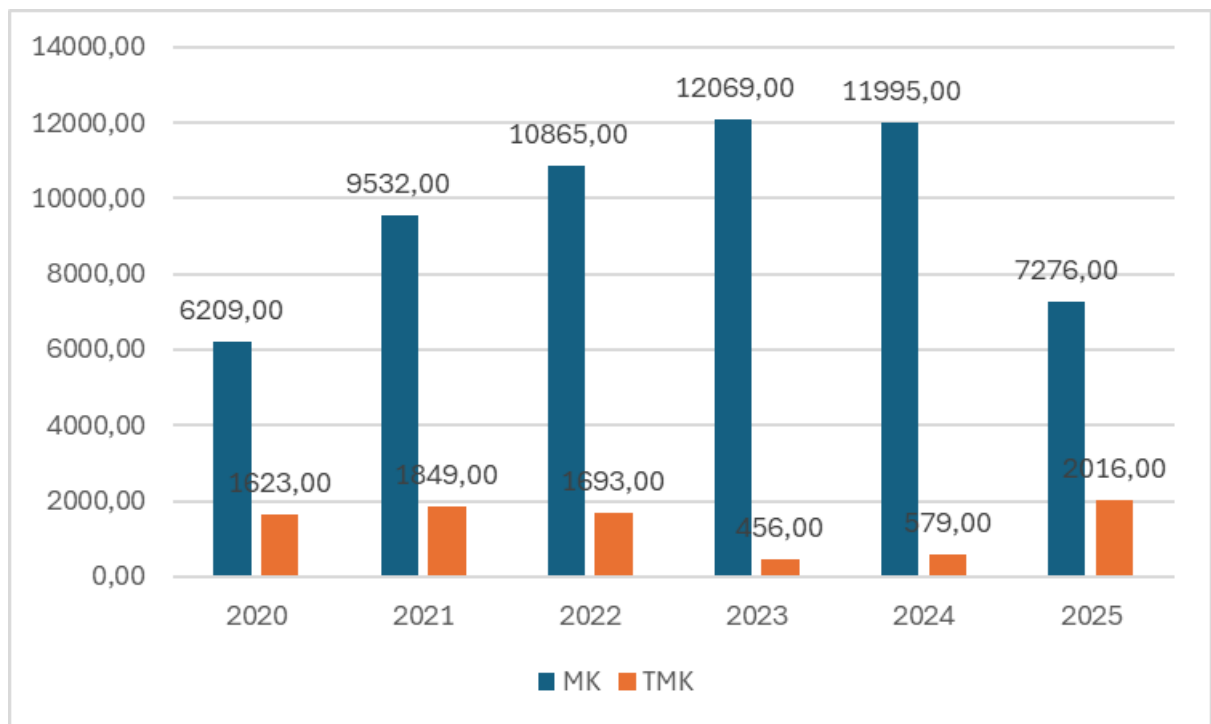
pemahaman terhadap regulasi, serta tindak lanjut pengawasan yang semakin optimal.

Terhadap iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif antara lain berupa perintah penghentian iklan, penarikan, pemusnahan, dan peringatan kepada pemilik izin edar produk yang bersangkutan. Berdasarkan data rekapitulasi rincian TMK iklan terdapat kategori pelanggaran iklan yaitu produk tidak terdaftar, mencantumkan testimoni, memberi hadiah dan mencantumkan klaim berlebihan sebagai pelanggaran yang paling banyak ditemukan.



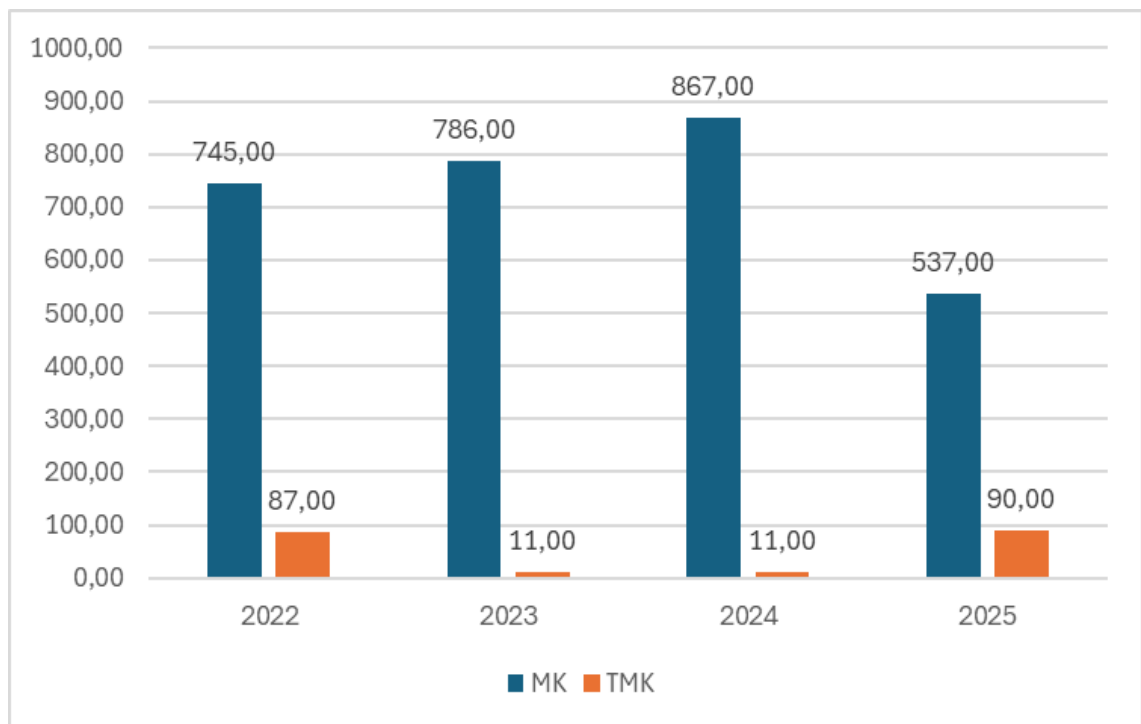
Grafik 15 Hasil Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Berdasarkan Media Tahun 2025

Untuk pengawasan penandaan obat bahan alam, berdasarkan hasil verifikasi laporan dari UPT Badan POM tahun 2025, dari 9.292 penandaan obat bahan alam sejumlah 78,30% penandaan MK dan 21,70% penandaan TMK. Rincian pelanggaran yang paling banyak ditemukan antara lain tidak mencantumkan 2D Barcode, mencantumkan komposisi yang berbeda atau tidak lengkap, klaim tidak sesuai, tidak mencantumkan no. batch/kode produksi, dan TMK gambar.



Grafik 16 Hasil Pengawasan Penandaan Obat Bahan Alam Tahun 2020-2025

Berdasarkan grafik tren pengawasan penandaan Obat Bahan Alam, jumlah produk yang disampling dan dievaluasi penandaannya mengalami peningkatan hingga tahun 2024, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2025 karena adanya upaya efisiensi anggaran. Selain itu, sampling yang dilakukan pada tahun 2025 hanya yang bersifat *targetted* berupa sampel-sampel dengan kategori tertentu berdasarkan kajian risiko. Penajaman pola pemilihan sampel yang dilakukan berdampak terhadap peningkatan TMK Penandaan produk Obat Bahan Alam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pelanggaran bersifat minor juga dimasukkan dalam kategori TMK dan ditindaklanjuti sepanjang tahun 2025. Kebanyakan pelanggaran disebabkan pelaku usaha UMKM yang masih menggunakan kemasan lama, di mana informasi yang tercantum sudah tidak sesuai dengan persetujuan baru. Selain itu, terdapat pula peningkatan sampel produk TIE untuk kategori Obat Bahan Alam yang mayoritas diproduksi di dalam negeri oleh pelaku usaha UKOT.



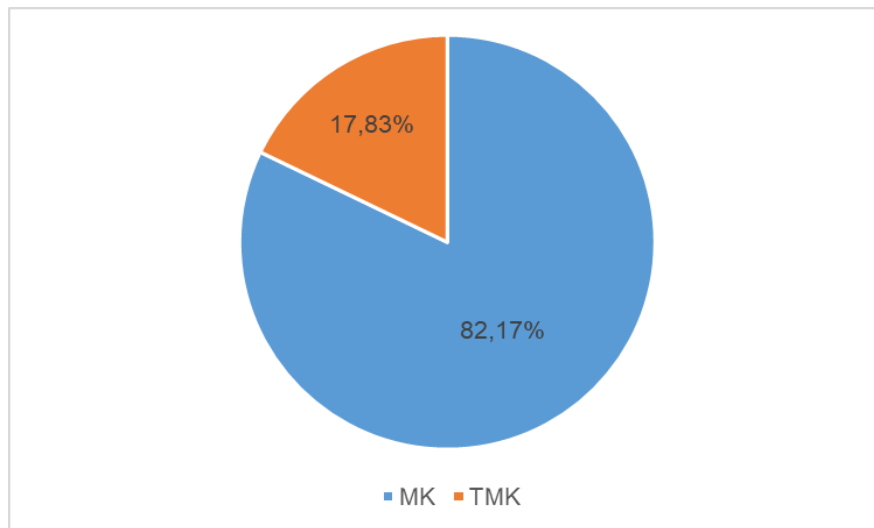
Grafik 17 Hasil Pengawasan Penandaan Obat Kuasi Tahun 2020-2025

Berdasarkan grafik tren pengawasan penandaan Obat Kuasi di atas, jumlah produk yang disampling dan dievaluasi penandaannya mengalami peningkatan hingga tahun 2024, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2025 karena adanya upaya efisiensi anggaran. Selain itu, sampling yang dilakukan pada tahun 2025 hanya yang bersifat *targetted* berupa sampel-sampel dengan kategori tertentu berdasarkan kajian risiko. Penajaman pola pemilihan sampel yang dilakukan berdampak terhadap peningkatan TMK Penandaan produk Obat Bahan Alam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pelanggaran bersifat minor juga dimasukkan dalam kategori TMK dan ditindaklanjuti sepanjang tahun 2025. Pelaku usaha yang memproduksi Obat Kuasi biasanya juga memproduksi Obat Bahan Alam sehingga tren temuan kedua komoditi ini sangat mirip satu sama lain.

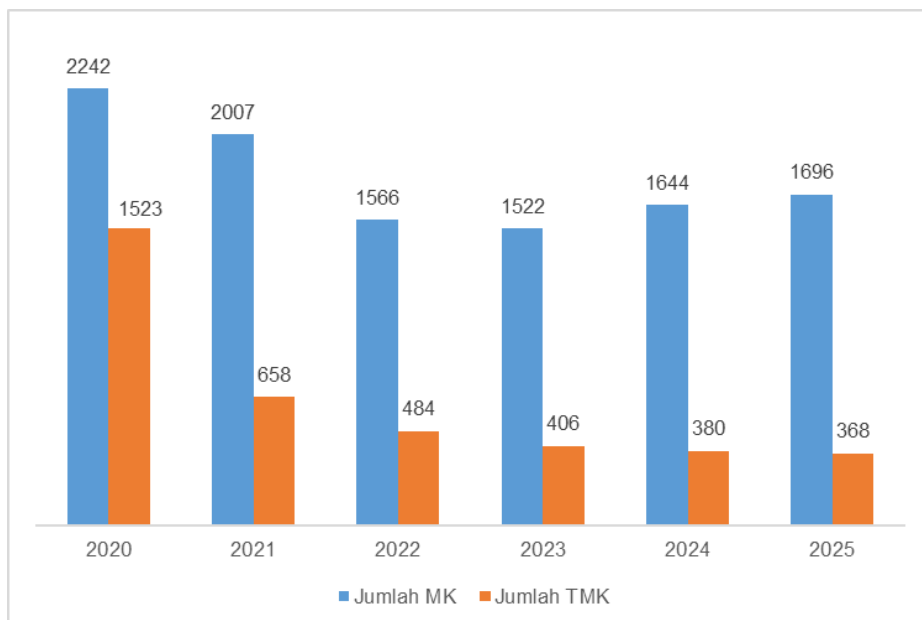
4. Pengawasan iklan dan penandaan suplemen kesehatan

Pengawasan terhadap iklan dan penandaan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, skema pengawasan iklan dan penandaan obat bahan alam adalah sama, yakni dilakukan oleh UPT Badan POM di seluruh Indonesia dan dilaporkan melalui SIPT. Hasil pengawasan ini kemudian diverifikasi oleh Badan POM Pusat.

Berdasarkan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan pada tahun 2025, dari 2064 iklan yang diawasi, sejumlah 1696 (82,17%) iklan memenuhi ketentuan (MK) dan sejumlah 368 (17,83%) iklan suplemen kesehatan tidak memenuhi ketentuan



Grafik 18 13Hasil Pengawasan Iklan Suplemen KesehatanTahun 2025

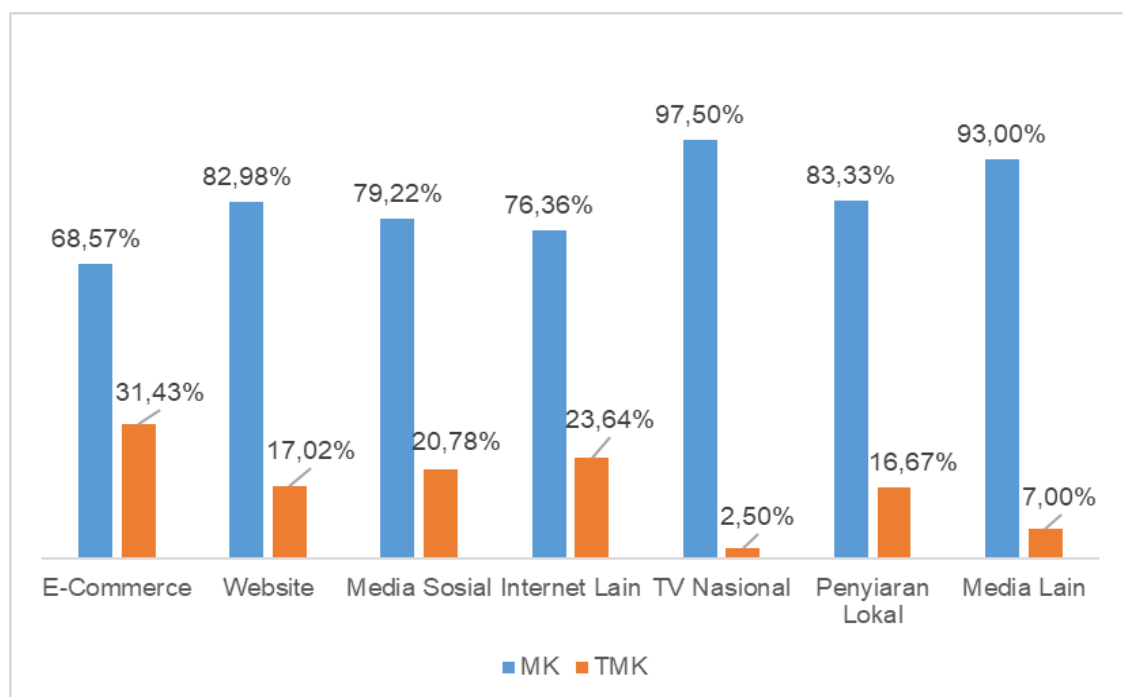


Grafik 19 Tren pengawasan iklan suplemen kesehatan tahun 2020-2025

Berdasarkan grafik tren pengawasan iklan suplemen kesehatan, Jumlah iklan MK mengalami penurunan pada periode 2020–2023, kemudian meningkat kembali pada 2024–2025 hingga mencapai 1.696 iklan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan periklanan suplemen kesehatan, seiring dengan penguatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan.

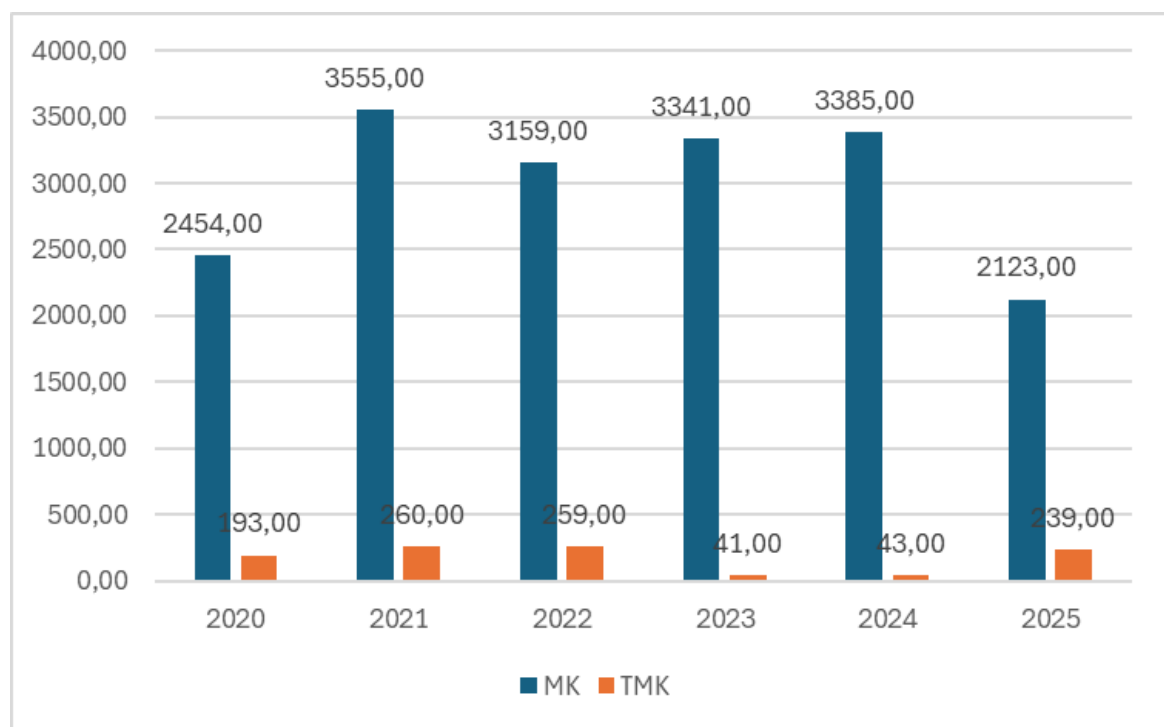
Sementara itu, jumlah iklan TMK mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1.523 iklan pada tahun 2020 menjadi 368 iklan pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan semakin berkurangnya pelanggaran pada iklan suplemen kesehatan, yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi serta efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan.

Terhadap suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif antara lain berupa perintah penghentian iklan, penarikan, pemusnahan, dan peringatan kepada pemilik izin edar produk yang bersangkutan. Berdasarkan data rekapitulasi rincian TMK iklan terdapat kategori pelanggaran iklan yaitu produk tidak terdaftar, mencantumkan testimoni, memberi hadiah dan mencantumkan klaim berlebihan sebagai pelanggaran yang paling banyak ditemukan.



Grafik 20 Hasil Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan Berdasarkan Media Tahun 2025

Untuk pengawasan penandaan suplemen kesehatan, berdasarkan hasil verifikasi laporan dari UPT Badan POM tahun 2025, dari 2.362 penandaan suplemen kesehatan sejumlah 89,88% penandaan MK dan 10,12% penandaan TMK. Rincian pelanggaran yang paling banyak ditemukan antara lain tidak mencantumkan 2D Barcode, mencantumkan komposisi berbeda atau tidak lengkap, tidak mencantumkan no batch/kode produksi, dan TMK gambar.



Grafik 21 Trend Hasil Pengawasan Penandaan Suplemen Kesehatan tahun 2020-2025

Berdasarkan grafik tren pengawasan penandaan Suplemen Kesehatan, jumlah produk yang disampling dan dievaluasi penandaannya mengalami peningkatan hingga tahun 2024, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2025 karena adanya upaya efisiensi anggaran. Selain itu, sampling yang dilakukan pada tahun 2025 hanya yang bersifat *targetted* berupa sampel-sampel dengan kategori tertentu berdasarkan kajian risiko. Penajaman pola pemilihan sampel yang dilakukan berdampak terhadap peningkatan TMK Penandaan produk Suplemen Kesehatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pelanggaran bersifat minor juga dimasukkan dalam kategori TMK dan ditindaklanjuti sepanjang tahun 2025. Dibandingkan dengan komoditi lain, tren

pelanggaran penandaan Suplemen Kesehatan jauh lebih rendah karena pelaku usaha yang memproduksinya adalah Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam/Industri Pangan dengan maturitas atau kepatuhan yang lebih baik dibandingkan UMKM. Namun, pada tahun 2025 terdapat tren peningkatan temuan produk Suplemen Kesehatan TIE yang diproduksi dari luar negeri, terutama diedarkan secara daring. Untuk menindaklanjutinya, diperlukan kerja sama yang komprehensif dengan pengawasan importir dan distribusi produk secara daring.

5. Monitoring efek samping obat bahan alam dan suplemen kesehatan

Monitoring efek samping obat bahan alam (OBA) dan suplemen kesehatan (SK) penting dilakukan dalam rangka pengawasan keamanan produk pasca pemasaran. Sistem monitoring dan pelaporan efek samping OBA dan SK dapat berasal dari berbagai sumber seperti rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan lain, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pemantauan aspek keamanan melalui monitoring efek samping/kejadian tidak diinginkan dari penggunaan OBA dan SK merupakan kegiatan post market yang diperlukan dalam rangka menjamin keamanan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain BPOM, pelaku usaha juga mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat bahan alam yang diedarkan. Oleh sebab itu, pelaku usaha diwajibkan melakukan monitoring efek samping obat bahan alam untuk dapat mendeteksi secara dini masalah keamanan suatu produk. Saat ini telah terdapat Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Petunjuk Teknis Penerapan Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan bagi Pemegang Izin Edar. Pada peraturan ini telah mewajibkan pemegang izin edar untuk melakukan monitoring dan pelaporan efek samping obat bahan alam.

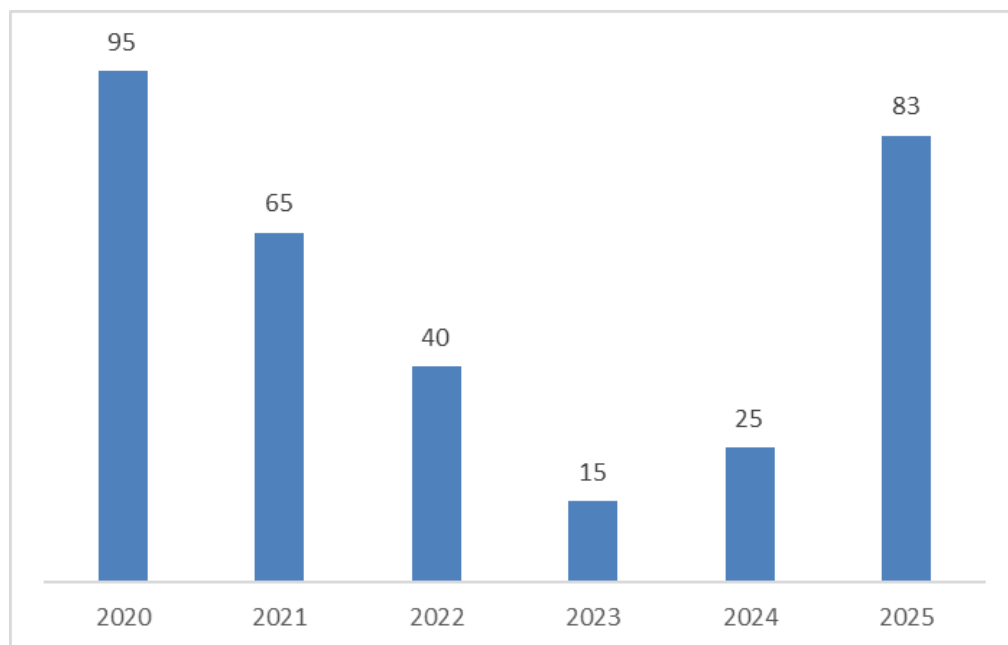
Pelaporan efek samping/ kejadian tidak diinginkan OBA dan SK yang diterima BPOM masih tergolong *under reported* dari segi jumlah laporan dan kualitas laporan yang tidak lengkap. Tidak semua laporan yang diterima oleh BPOM dapat dievaluasi hubungan kausalitasnya karena masih kurangnya informasi. Oleh karena itu selama tahun 2025 telah dilakukan beberapa upaya untuk penguatan sistem pengawasan efek samping OBA dan SK, antara lain:

- a. Penguatan kewajiban pelaku usaha dalam sistem farmakovigilans

- b. Peningkatan kapasitas petugas Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta UPT BPOM.
- c. Komunikasi dan Edukasi informasi keamanan OBA dan SK melalui website resmi BPOM dan media sosial.
- d. Optimalisasi sistem pelaporan efek samping melalui pengembangan sistem e-MESO.

Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam

Pada tahun 2025 telah diterima sebanyak 83 laporan efek samping obat bahan alam yang diterima melalui sistem elektronik (e-reporting) melalui aplikasi mobile e-MESOT maupun website e-mesot.pom.go.id, Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKER) serta manual (e-mail dan surat masuk).

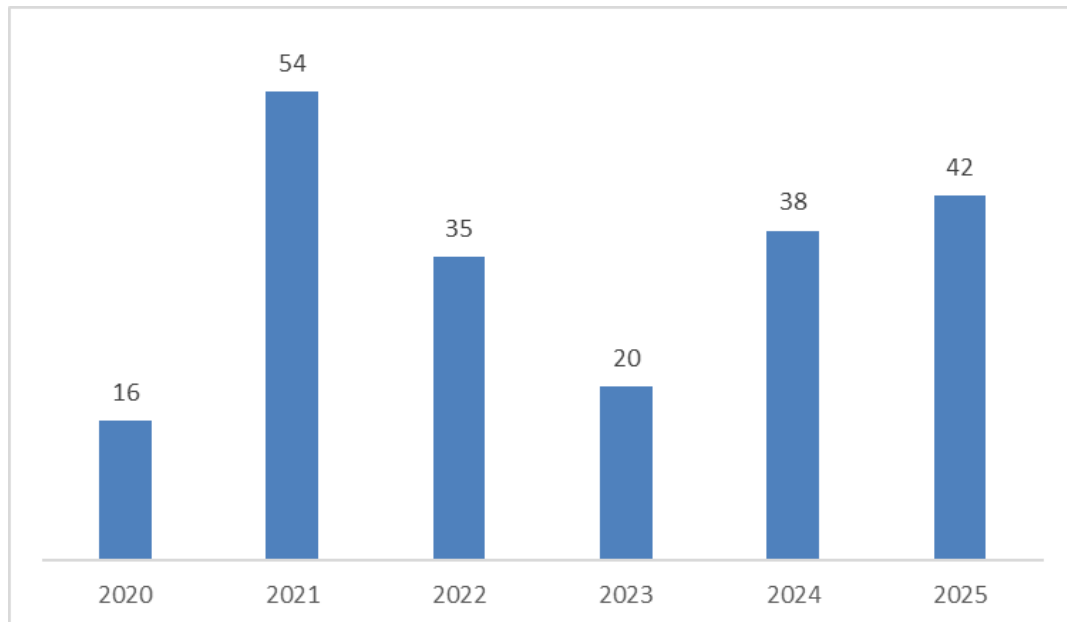


Grafik 22 Profil Laporan Efek Samping Obat Bahan Alam yang Diterima oleh BPOM Tahun 2020-2025

Berdasarkan grafik jumlah laporan efek samping Obat Bahan Alam (OBA) yang diterima dan ditindaklanjuti BPOM selama periode 2020–2025, terlihat adanya tren penurunan jumlah laporan sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, pada tahun 2024 dan 2025 terdapat peningkatan jumlah laporan. Peningkatan laporan sejak tahun 2024 menunjukkan adanya penguatan sistem pengawasan efek samping OBA.

Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan

Pada tahun 2025 telah diterima 42 laporan efek samping suplemen kesehatan yang diterima melalui sistem elektronik (e-reporting) melalui aplikasi mobile E-MESOT maupun website e-mesot.pom.go.id, Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKER) serta manual (e-mail dan surat masuk).



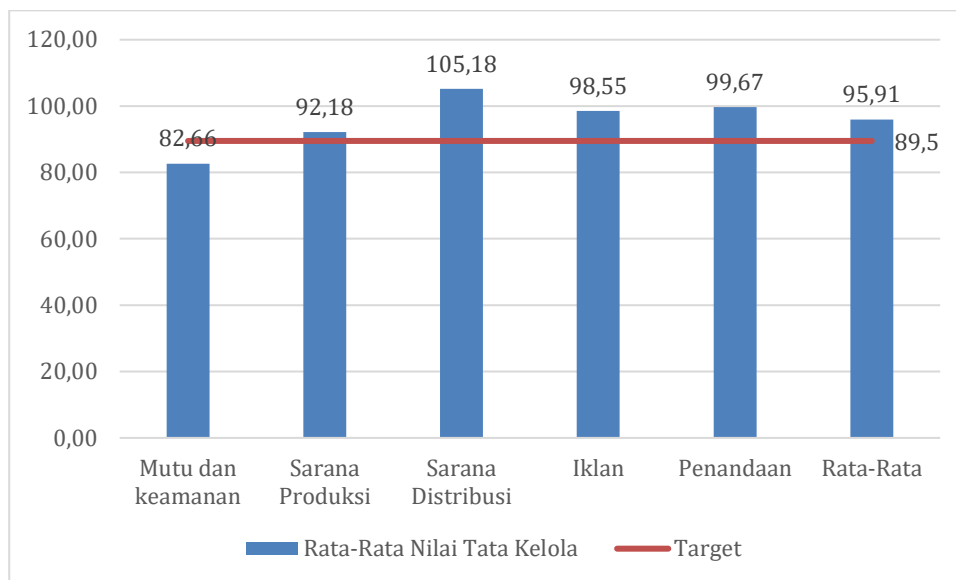
Grafik 23 Laporan Efek Samping Suplemen Kesehatan yang Diterima oleh BPOM Tahun 2020-2025

Berdasarkan grafik jumlah laporan efek samping Suplemen Kesehatan (SK) yang diterima dan ditindaklanjuti BPOM selama periode 2020–2025, terlihat adanya penurunan jumlah laporan selama tahun 2021 - 2023, pada tahun 2024 dan 2025 terdapat peningkatan jumlah laporan. Peningkatan laporan sejak tahun 2024 menunjukkan adanya penguatan sistem pengawasan efek samping Suplemen Kesehatan.

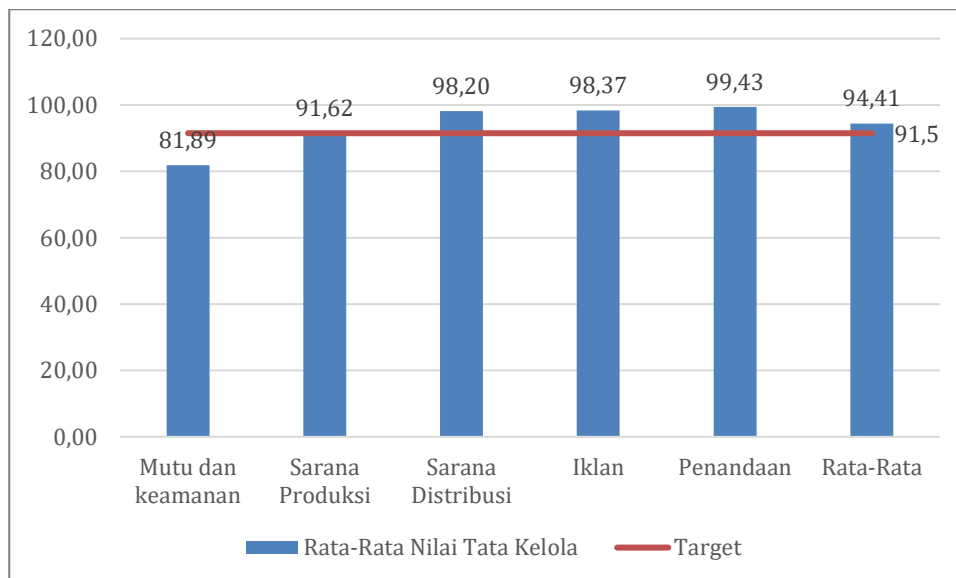
6. Nilai Tata Kelola Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan

Sebagai bentuk pemastian kualitas pelaksanaan pengawasan di UPT, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah melakukan penilaian tata kelola terhadap seluruh UPT BPOM di Indonesia pada tahun 2025. Penilaian mencakup 5 (lima) fungsi pengawasan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu pengawasan keamanan dan mutu produk, sarana produksi, sarana distribusi, iklan, dan penandaan, dan dilaksanakan sesuai definisi operasional dalam manual IKU Renstra.

Secara keseluruhan, capaian rata-rata nilai tata kelola seluruh UPT telah melampaui target yang ditetapkan. Untuk komoditi Obat Bahan Alam, capaian rata-rata sebesar 95,91% dari target 89,5% (107,17%), sedangkan untuk Suplemen Kesehatan sebesar 94,41% dari target 91,5% (103,18%).



Grafik 24 Laporan Rata-Rata Nilai Tata Kelola Obat Bahan Alam Tahun 2025



Grafik 25 Laporan Rata-Rata Nilai Tata Kelola Suplemen Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, hampir seluruh fungsi pengawasan melampaui target yang ditetapkan, kecuali pada fungsi pengawasan keamanan dan mutu produk yang berada di bawah target pada kedua komoditi OBA dan SK (OBA: 82,66%;

SK: 81,89%). Dua parameter dengan capaian terendah pada fungsi ini adalah kelengkapan laporan dan ketepatan waktu pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan, serta ketepatan waktu tanggapan surat tindak lanjut hasil pengawasan. Pada parameter ketepatan waktu tanggapan surat tindak lanjut hasil pengawasan, capaian hingga akhir Desember 2025 masih sangat rendah yaitu OBA: 39,11% dan SK: 37,22%. Capaian rendah tersebut antara lain disebabkan karena terdapat 8 (delapan) UPT untuk komoditi OBA dan 22 (dua puluh dua) UPT untuk komoditi SK yang sama sekali tidak merespons surat tindak lanjut yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

UPT dengan capaian nilai tata kelola terbaik untuk OBA adalah Loka POM di Kab. Belu (127,80%), Loka POM di Kab. Sumba Timur (122,02%), dan Loka POM di Kab. Manggarai Barat (103,50%); Sedangkan untuk Suplemen Kesehatan adalah Loka POM di Kota Lubuklinggau (100,11%), Balai POM di Palu (99,65%), dan Balai POM di Tulangbawang (99,42%). Sebaliknya, UPT yang nilai rata-rata berada di bawah target pada komoditi OBA dan SK adalah Loka POM di Kab. Aceh Selatan, Loka POM di Kab. Aceh Tengah, Balai POM di Tangerang, dan Balai Besar POM di Makassar. Berdasarkan hasil evaluasi, kendala yang dihadapi antara lain belum meratanya kompetensi petugas akibat mutasi lintas fungsi, belum optimalnya supervisi oleh petugas senior, serta koordinasi dengan laboratorium regional yang belum efektif.

Dalam rangka peningkatan tata kelola UPT secara berkelanjutan, sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan upaya monitoring dan evaluasi (monev) dan supervisi sebagai bentuk pembinaan. Monev dilaksanakan setiap bulan sebagai mekanisme *early warning* dan triwulanan sebagai forum evaluasi komprehensif bersama seluruh UPT. UPT dengan nilai tata kelola fungsi pengawasan OBA dan/atau SK yang kurang baik dilakukan coaching clinic dan/atau bimbingan teknis secara online. Coaching clinic antara lain dilakukan pada UPT yang masih kesulitan melakukan tata kelola pengawasan produk (sampling, pengujian, pengawasan penandaan), sedangkan bimbingan teknis dilakukan pada seluruh UPT karena berdasarkan evaluasi diketahui banyak inspektur yang masih belum sepenuhnya memahami klasifikasi temuan hasil inspeksi dan cara membuat laporan inspeksi yang baik. Dampaknya, nilai tata kelola menunjukkan tren

peningkatan dari triwulan ke triwulan dan akhirnya secara rata-rata memenuhi target pada akhir tahun 2025, meskipun masih diperlukan perhatian besar dalam peningkatan tata kelola pengawasan terkait respon surat tindak lanjut.

Direktorat Pengawasan OT dan SK juga menjadi pembina 4 (empat) UPT terkait fungsi pengawasan obat dan makanan. Keempat UPT tersebut adalah BBPOM di Medan, BPOM di Tarakan, Loka POM di Tanjung Balai dan Loka POM di Toba. Secara khusus Ditwas OTSK mengevaluasi kinerja dan kendala keempat balai tersebut dan melakukan supervisi yang diperlukan. Pada tahun 2025 dilaksanakan supervisi pada loka POM di Toba dan BBPOM di Medan selaku balai koordinator dari loka POM di Toba. Kendala yang dihadapi loka POM di Toba antara lain terkait sumber daya manusia dan pelayanan publik. Oleh karena itu dilakukan supervisi diantaranya forum komunikasi dan desk pelayanan publik (registrasi dan sertifikasi) dengan mengundang pelaku usaha di bidang OBA dan Kosmetik dan pemerintah daerah terkait (bidang kesehatan, BKPM, perdagangan dan perindustrian) untuk membahas kendala dan masalah, serta membantu memenuhi persyaratan registrasi atau sertifikasi. Supervisi tersebut langsung dipimpin oleh Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos.



Gambar 10 Supervisi Loka POM di Kab. Toba

7. Penjelasan Publik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung Bahan Kimia Obat

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah melaksanakan kegiatan penjelasan publik/ public warning terhadap Obat Bahan Alam (OBA) dan Suplemen Kesehatan (SK) yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sebanyak sembilan kali. Kegiatan ini dilakukan melalui penerbitan siaran pers pada website resmi Badan POM serta disebarluaskan melalui akun media sosial unit sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat dan upaya perlindungan kesehatan publik.

Sebanyak 190 produk OBA dan SK mengandung BKO telah diumumkan dalam public warning, terdiri atas 176 produk tanpa izin edar dan 14 produk terdaftar yang telah pembatalan izin edarnya. Tiga klaim produk mengandung BKO terbanyak yaitu klaim stamina pria/ sehat pria/ seks, pegal linu/ encok/ asam urat/ rematik, serta pelangsing/ penurunan kadar lemak/ singset/ diet.

REGULASI PROFIL LAYANAN CEKBPM KINERJA INFORMASI PUBLIK REFORMASI BIROKRASI PENGADUAN

ID ▾ 🔍 



SIARAN PERS

Nomor HM.01.1.2.09.25.150 Tanggal 1 September 2025

Tentang

BPOM Ungkap 18 Produk Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Ilegal dan Mengandung BKO Periode Juli 2025

Jakarta – BPOM kembali mengungkap 16 produk obat tradisional berbahan alam (OBA) dan 2 produk suplemen kesehatan (SK) ilegal dan positif mengandung bahan kimia obat (BKO) yang dilarang digunakan dalam produk berbasis bahan alam. Temuan ini merupakan hasil pengawasan intensif selama periode bulan Juli 2025. Secara rinci, temuan terdiri atas 9 produk OBA tanpa nomor izin edar (NIE), 6 produk mencantumkan nomor izin edar fiktif, dan 3 produk dengan NIE dibatalkan.

Temuan ini berasal dari serangkaian kegiatan pengawasan, *sampling*, dan pengujian laboratorium terhadap 1.680 sampel OBA, obat kuasi, dan SK yang beredar di pasaran. Pengujian tidak hanya dilakukan pada produk yang ditemukan di lapangan, tetapi juga dilanjutkan dengan penelusuran ke fasilitas distribusi dan produksi.

Dari temuan tersebut, sebanyak 8 produk OBA ilegal yang mengandung BKO didominasi kandungan sildenafil/tadalafil/nortadalafil dengan klaim menambah stamina/vitalitas pria. Sebanyak 6 produk OBA mengandung BKO deksametason/parasetamol/klorfeniramin maleat/natrium diklofenak dengan klaim untuk pegal linu dan 2 produk OBA mengandung BKO siproheptadin dengan klaim nafsu makan. Selain itu, 2 produk SK ditemukan mengandung BKO melatonin dengan klaim untuk memelihara kesehatan. Daftar produk-produk OBA mengandung BKO yang ditemukan BPOM selama periode pengawasan bulan Juli 2025 selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran**.

Pengujian laboratorium terhadap sejumlah produk tanpa izin edar dan/atau mengklaim manfaat kesehatan menunjukkan bahwa sildenafil telah ditambahkan untuk memberikan efek instan. Temuan ini sangat mengkhawatirkan karena konsumsi sildenafil tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan efek samping serius, seperti gangguan jantung, tekanan darah tidak stabil, hingga kematian.

Pada temuan 2 SK yang mengandung BKO melatonin, produk tidak mencantumkan kandungannya dengan jelas dan tidak memiliki izin edar resmi. Melatonin merupakan hormon yang secara alami diproduksi oleh tubuh (khususnya di kelenjar pineal di otak) dan berperan penting dalam mengatur ritme tidur-bangun (siklus sirkadian). Dalam dunia farmasi, melatonin digunakan sebagai bahan aktif dalam suplemen atau obat untuk membantu mengatasi gangguan tidur tertentu, seperti insomnia atau *jet lag*, bukan untuk ditambahkan dalam produk berbasis bahan alam.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengungkap keprihatinannya atas masih maraknya peredaran produk ilegal mengandung BKO di tengah masyarakat. Menurutnya, penambahan BKO pada produk yang seharusnya berbasis bahan alam adalah pelanggaran serius dan mengancam keselamatan konsumen.





Gambar 11 penjelasan publik/ public warning terhadap OBA dan SK yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)

Pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis klaim produk menunjukkan adanya perbedaan pola kebutuhan dan potensi risiko penggunaan produk pada kelompok masyarakat tertentu, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan strategi komunikasi risiko dan prioritas pengawasan yang lebih responsif. Dari hasil analisis, tidak ditemukan kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap informasi *public warning* karena informasi disampaikan secara terbuka melalui berbagai kanal komunikasi digital yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

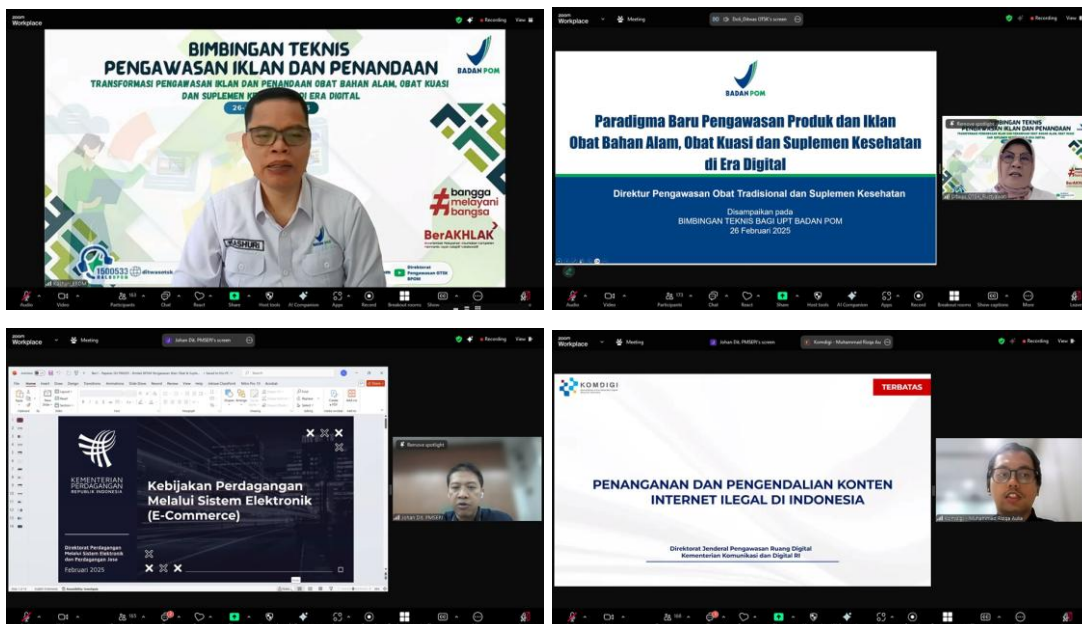
Namun demikian, terdapat tantangan eksternal berupa masih tingginya minat masyarakat terhadap produk dengan klaim instan serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terkait risiko penggunaan produk mengandung BKO. Sementara itu, tantangan internal meliputi perlunya penguatan strategi komunikasi publik agar informasi pengawasan dapat lebih mudah dipahami dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terus meningkatkan diseminasi informasi melalui media digital, penguatan edukasi publik, serta pemanfaatan analisis data pengawasan sebagai dasar dalam penentuan fokus pengawasan dan komunikasi risiko kepada masyarakat.

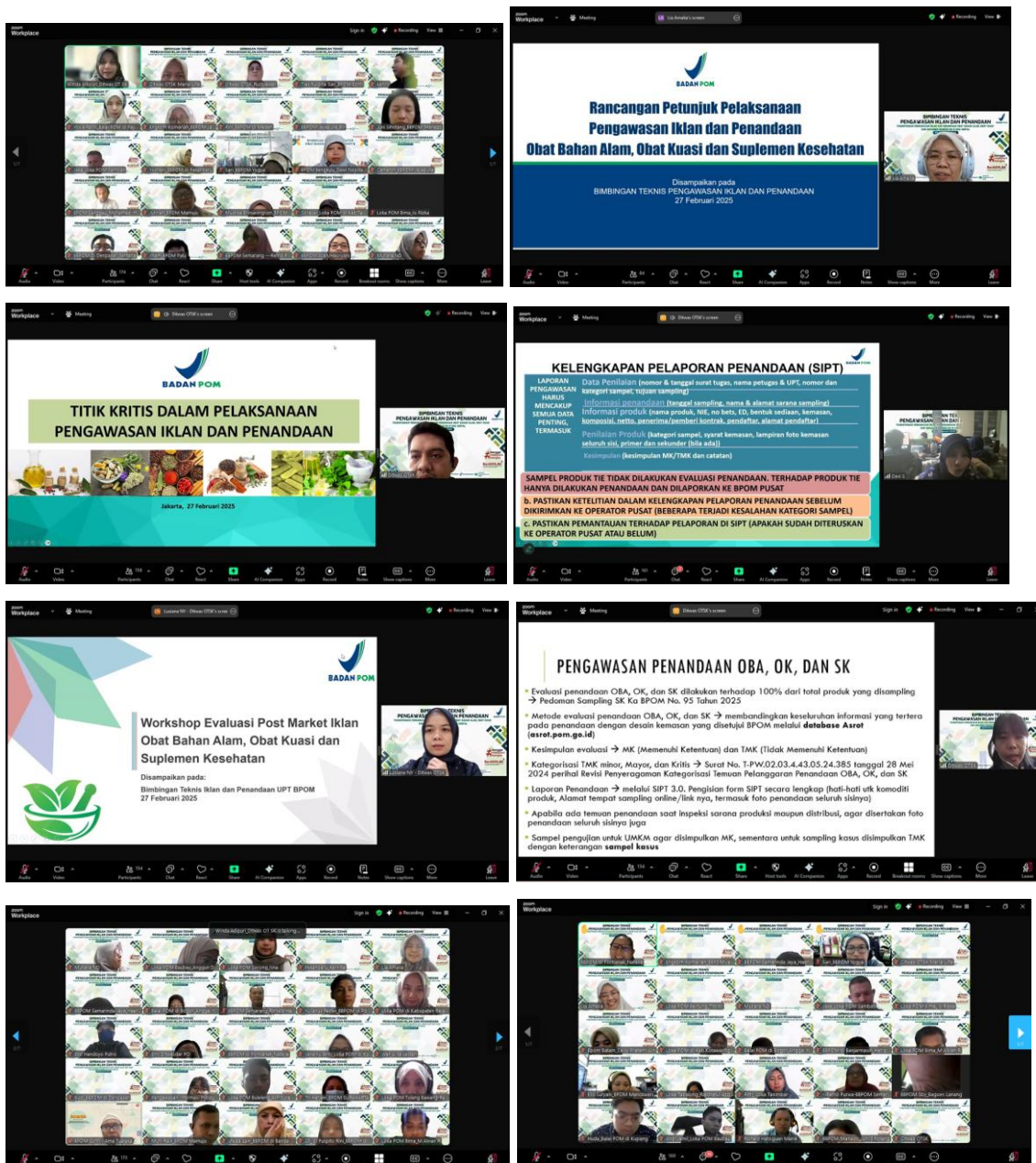
8. Transformasi pengawasan iklan dan penandaan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan di era digital

Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Iklan dan Penandaan bagi UPT Badan POM secara daring pada tanggal 26–27 Februari 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Mohammad Kashuri, yang menyampaikan bahwa perkembangan era digital menghadirkan tantangan pengawasan yang semakin kompleks sehingga diperlukan strategi pengawasan yang efektif, salah satunya melalui mitigasi pelanggaran produk yang dipasarkan secara daring.

Sejalan dengan tema kegiatan, yaitu “Transformasi Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan di Era Digital”, kegiatan ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain Social Media Analyst serta perwakilan dari Komdigi dan Kemendag. Selain itu, dilaksanakan diskusi mendalam terkait teknis pengawasan iklan dan penandaan OBA, OK, dan SK antara Tim Pengawasan Iklan dan Penandaan dengan para peserta kegiatan. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi dalam menghadapi tantangan digital serta meningkatkan efektivitas sistem pengawasan BPOM, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan promosi produk.





Gambar 12 kegiatan Bimbingan Teknis Iklan dan Penandaan bagi UPT Badan POM pada tanggal 26–27 Februari 2025

9. Forum Koordinasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi)

Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan kegiatan FONDASI (Forum Koordinasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi) dengan tema “Kontrak Boleh Eksklusif, Tanggung Jawab Tetap Kolektif: Sinergi Peran Produsen dan Distributor dalam Iklan dan Penandaan Produk” yang dilaksanakan pada 9 Mei 2025 di Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Badan POM.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai respons terhadap tren meningkatnya kerja sama kontrak antara distributor dan fasilitas produksi Obat Bahan Alam, khususnya Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). Kondisi tersebut memerlukan strategi pengawasan yang efektif agar produsen dan distributor memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing dalam mengedarkan produk obat bahan alam yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

Melalui kegiatan FONDASI, diharapkan pelaku usaha Obat Bahan Alam semakin berkomitmen dan memiliki pemahaman yang lebih baik terkait aspek keamanan, manfaat, dan mutu produk, termasuk kepatuhan terhadap regulasi promosi dan penandaan.

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh pelaku usaha UMK Obat Bahan Alam beserta distributornya. Narasumber pada kegiatan ini terdiri atas Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, PFM Ahli Utama Badan POM, Bambang Sumaryanto, serta paparan materi dari Ketua Tim Penandaan dan Iklan serta Ketua Tim Inspeksi.





Gambar 13 kegiatan FONDASI 9 Mei 2025

10. Penguatan Intuisi Inspektur Mengungkap Obat Bahan Alam (Oba) Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Dengan Tema Penguatan Analisis Data Pengawasan Berbasis Risiko Oba Mengandung BKO.

Kegiatan In House Training Penguatan Kemampuan Petugas Pengawasan dalam Penanganan Obat Bahan Alam (OBA) Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dengan tema “Penguatan Analisis Data dan Informasi, Penelusuran, dan Tindak Lanjut Pengawasan Berbasis Risiko OBA Mengandung BKO”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara hybrid pada tanggal 6–7 Agustus 2025 di Balai Besar POM di Bandung.

Sebagai salah satu langkah mitigasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Badan POM terus memperkuat kapasitas inspektur melalui peningkatan kemampuan teknis dan intuitif. Dalam hal ini, Badan POM mendorong penguatan sistem pengawasan berbasis human intelligence (HUMINT), antara lain melalui analisis data pengawasan dan pengumpulan informasi secara sistematis.

Pendekatan pengawasan berbasis intelijen menjadi semakin penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Pemanfaatan alat bantu intelijen, termasuk Open Source Intelligence (OSINT), dapat membantu petugas pengawasan dalam mengidentifikasi pola distribusi, mengumpulkan bukti awal, serta menelusuri jaringan pelaku secara lebih cepat, tepat, dan efisien.

Melalui kombinasi teori dan praktik dalam pelatihan ini, diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dan efektif, sehingga mampu mendukung perlindungan kesehatan masyarakat serta mendorong terciptanya industri yang patuh terhadap regulasi.

11. Forum Akselerasi Dan Penajaman Target Pengawasan Sarana, Produk dan Iklan Berbasis Risiko

Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Forum Akselerasi dan Penajaman Sampling Target Pengawasan Sarana, Produk dan Iklan Berbasis Risiko dengan fokus pada desk perencanaan pengawasan sarana, produk dan iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.



Forum ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, serta Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam penyusunan perencanaan sampling berbasis risiko, meningkatkan pemahaman terhadap prioritas pengawasan, serta mempertajam strategi dan indikator risiko

yang digunakan dalam penetapan target pengawasan. Melalui kegiatan ini, diharapkan perencanaan kerja pengawasan Tahun 2026 dapat tersusun secara lebih terarah, efektif, dan berdampak, serta mampu menjawab tantangan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko secara optimal.

SK.2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi obat bahan alam Indonesia aman dan bermutu

Anggaran pada sasaran ini terblokir keseluruhan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan selama tahun 2025

SK.3 Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu

Anggaran pada sasaran ini terblokir keseluruhan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan selama tahun 2025

SK.4 Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam

Anggaran pada sasaran ini terblokir keseluruhan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan selama tahun 2025

SK.5 Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima

1. Penerbitan sertifikasi CPOBAB

Dalam rangka meningkatkan pemenuhan terhadap Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB), selama tahun 2025 BPOM telah menerbitkan 180 sertifikat CPOBAB terdiri dari 45 sertifikat untuk sarana IOBA, 7 sertifikat untuk sarana IEBA dan 11 sertifikat untuk sarana UKOBA. BPOM juga telah menerbitkan 568 sertifikat pemenuhan aspek CPOBAB Bertahap terdiri dari 213 sertifikat untuk sarana UKOBA dan 66 sertifikat untuk sarana UMOBA sepanjang tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BPOM juga menerbitkan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Sepanjang tahun 2025, BPOM menerbitkan :

- Persetujuan penggunaan fasilitas produksi obat bahan alam bersama dengan kosmetik dan pangan olahan sebanyak 20 persetujuan.
- Rekomendasi importir obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan sebanyak 105 rekomendasi.
- Persetujuan memproduksi suplemen kesehatan di fasilitas pangan sebanyak 2 persetujuan.
- Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar sebanyak 1 persetujuan



Grafik 26 Profil Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memperoleh Sertifikat CPOBAB Tahun 2020-2025



Grafik 27 Profil Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB Secara Bertahap Tahun 2020-2025

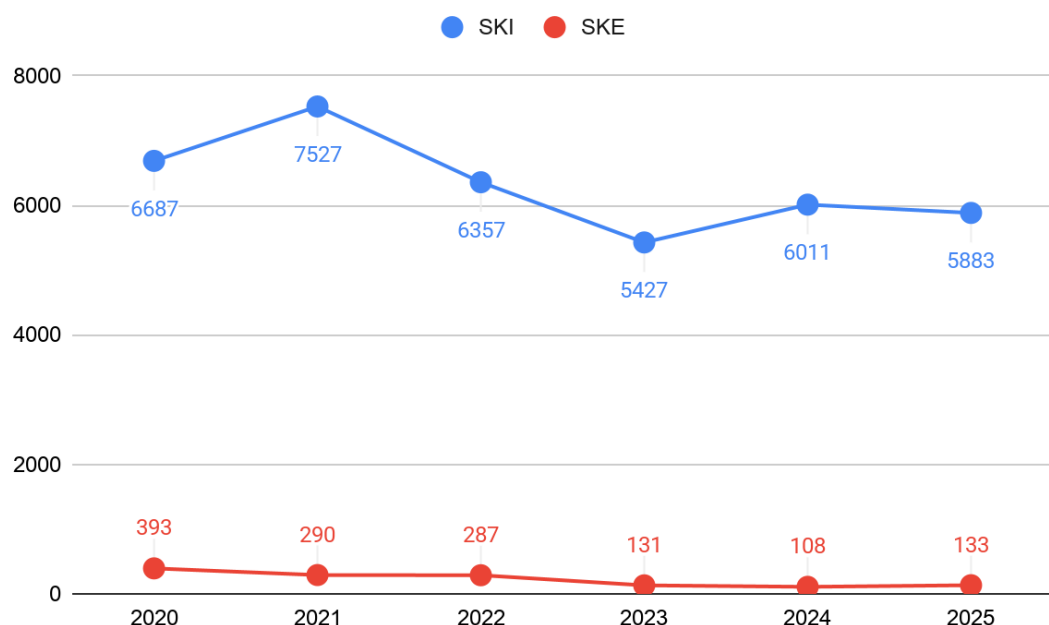
Jumlah sarana produksi obat bahan alam yang memperoleh sertifikat CPOBAB selama 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif. Upaya yang telah dilakukan Badan POM untuk meningkatkan kualitas sertifikasi CPOBAB yaitu percepatan pelayanan publik penerbitan sertifikasi CPOBAB. Badan POM juga telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain desk CAPA dengan pelaku usaha guna percepatan penyelesaian CAPA, bimbingan teknis CPOBAB guna peningkatan kompetensi personil di IOBA dan pemantauan timeline secara elektronik melalui sistem E-Sertifikasi.

Bimbingan teknis tidak hanya diberikan kepada personil di IOBA saja melainkan juga diberikan secara intensif kepada petugas Badan POM yang bertugas mendampingi pelaku usaha. Komitmen percepatan timeline sertifikasi CPOBAB diperkuat dengan terbitnya Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik di mana di dalamnya terdapat ketentuan percepatan timeline yang semula 50 hari kerja menjadi 35 hari kerja.

2. Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Obat Bahan Alam, Suplemen kesehatan dan kuasi Obat Bahan Alam

Selama tahun 2025, BPOM telah menerbitkan 548 surat keterangan impor (SKI) obat bahan alam, SKI 1.095 bahan obat bahan alam, dan 4.240 SKI bahan kimia HS Code obat bahan alam dan suplemen kesehatan. Dalam upaya mendorong ekspor obat bahan alam, telah diterbitkan 136 surat keterangan ekspor (SKE) obat bahan alam dan bahan obat bahan alam, meliputi 92 Certificate of Free Sales, 19 Health Certificate, 16 Certificate of Pharmaceutical Product, 7 Surat Keterangan GMP, dan 2 dokumen To Whom It May Concern.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, BPOM tidak menerbitkan surat persetujuan pemasukan bahan baku yang memiliki HS Code yang sama dengan komoditi yang diawasi oleh BPOM dengan tujuan penggunaan bukan untuk Obat dan Makanan.



Grafik 28 Profil SKI dan SKE Obat Bahan Alam yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2020-2025

Berdasarkan data penerbitan surat keterangan impor selama tahun 2020-2025 terjadi tren penurunan impor obat bahan alam. Hal ini menjadi peluang untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri. Dengan semakin berkurangnya ketergantungan terhadap produk impor, diperlukan

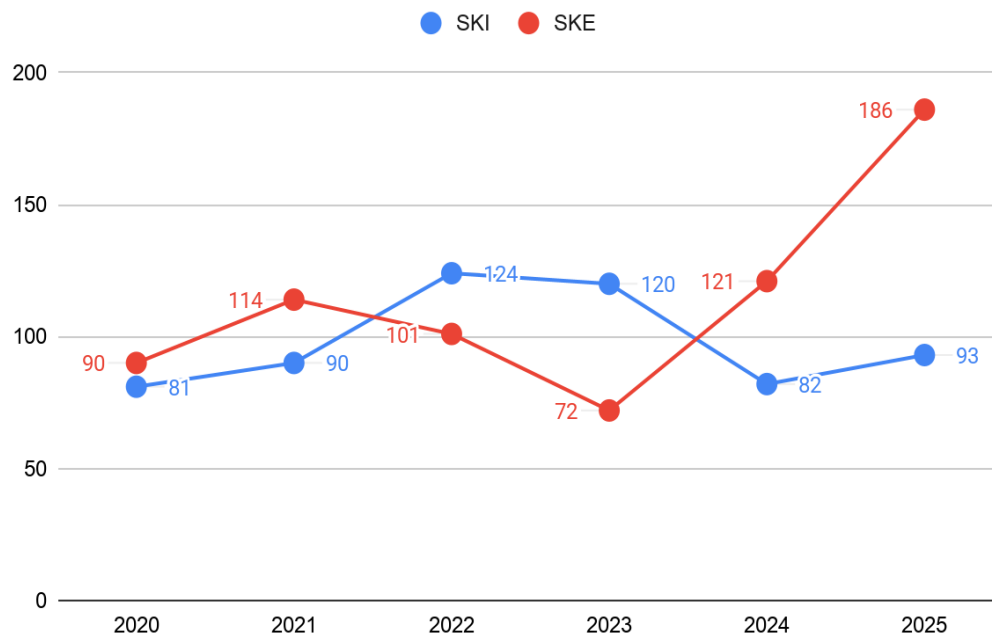
penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha nasional agar peningkatan kapasitas produksi tetap sejalan dengan pemenuhan standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk obat bahan alam. Namun, perlu tetap didalami, apakah penurunan ini disebabkan substitusi produk lokal, penurunan permintaan, hambatan perdagangan, atau kendala perizinan impor.

Menurunnya tren penerbitan surat keterangan ekspor obat bahan alam menunjukkan bahwa pemanfaatan peluang pasar luar negeri untuk produk obat bahan alam Indonesia masih perlu diperkuat. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan permintaan pasar global, persyaratan negara tujuan yang semakin ketat, kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu dan dokumen ekspor, serta belum optimalnya diversifikasi negara tujuan ekspor.

Obat **Kuasi**

Dalam rangka mendorong ekspor obat kuasi, selama tahun 2025 BPOM telah mengeluarkan 186 SKE yang meliputi 102 Certificate of Free Sale, 63 Certificate of Pharmaceutical Product, 4 Health Certificate dan 17 Surat Keterangan GMP.

Terhadap obat kuasi impor, BPOM telah mengeluarkan 93 SKI obat kuasi melalui aplikasi E-BPOM yang telah terintegrasi dengan INSW.



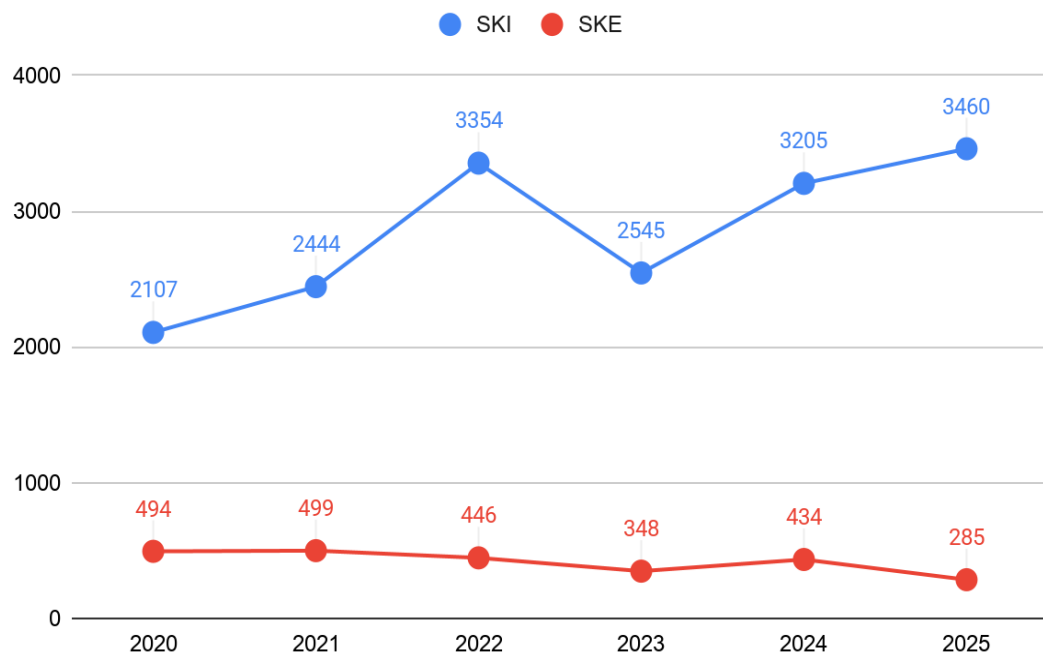
Grafik 29 Profil SKI dan SKE Obat Kuasi yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2020-2025

Dari Gambar dapat dilihat tren peningkatan ekspor obat kuasi dari tahun 2020 hingga 2025, hal ini dapat menjadi sinyal adanya penguatan daya saing produk Indonesia di pasar global, baik dari aspek mutu, keamanan, pemenuhan persyaratan ekspor, maupun meningkatnya kepercayaan negara tujuan terhadap produk obat kuasi yang diproduksi di Indonesia. Capaian ini juga mencerminkan bahwa pelaku usaha semakin mampu memenuhi standar dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam perdagangan internasional. Hal ini merupakan indikator positif atas meningkatnya kapasitas dan kesiapan pelaku usaha dalam menembus pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan telah berkontribusi terhadap penguatan daya saing produk obat kuasi Indonesia, khususnya dalam pemenuhan aspek mutu, keamanan, legalitas, dan kelengkapan dokumen ekspor. Capaian ini perlu terus dijaga melalui penguatan pendampingan pelaku usaha, pemetaan negara tujuan ekspor potensial, peningkatan pemenuhan standar mutu dan keamanan produk, serta optimalisasi layanan ekspor agar pertumbuhan ekspor dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Suplemen Kesehatan

Dalam rangka mendorong ekspor produk suplemen kesehatan, selama tahun 2025 BPOM telah mengeluarkan 286 SKE produk yang terdiri dari 100 Certificate of Free Sale, 58 Certificate of Pharmaceutical Product, 110 Health Certificate dan 18 Surat Keterangan GMP produk suplemen kesehatan.

Terhadap suplemen kesehatan impor, BPOM telah mengeluarkan 1.065 SKI produk dan 2.395 SKI bahan baku.



Grafik 30 Profil SKI dan SKE Suplemen Kesehatan yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2020-2025

Penurunan ekspor suplemen kesehatan pada tahun berjalan menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja, karena menunjukkan perlunya penguatan fasilitasi ekspor dan peningkatan daya saing produk suplemen kesehatan Indonesia. Meskipun suplemen kesehatan memiliki potensi pasar yang luas seiring meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap kesehatan, pemenuhan aspek mutu, keamanan, legalitas, klaim, penandaan, serta persyaratan dokumen negara tujuan tetap menjadi faktor utama dalam memperluas akses pasar internasional.

Disisi lain, dari grafik menunjukan tren kenaikan impor suplemen kesehatan, hal ini dapat dianggap sebagai peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap produk kesehatan preventif dan promotif, sedangkan tantangannya adalah

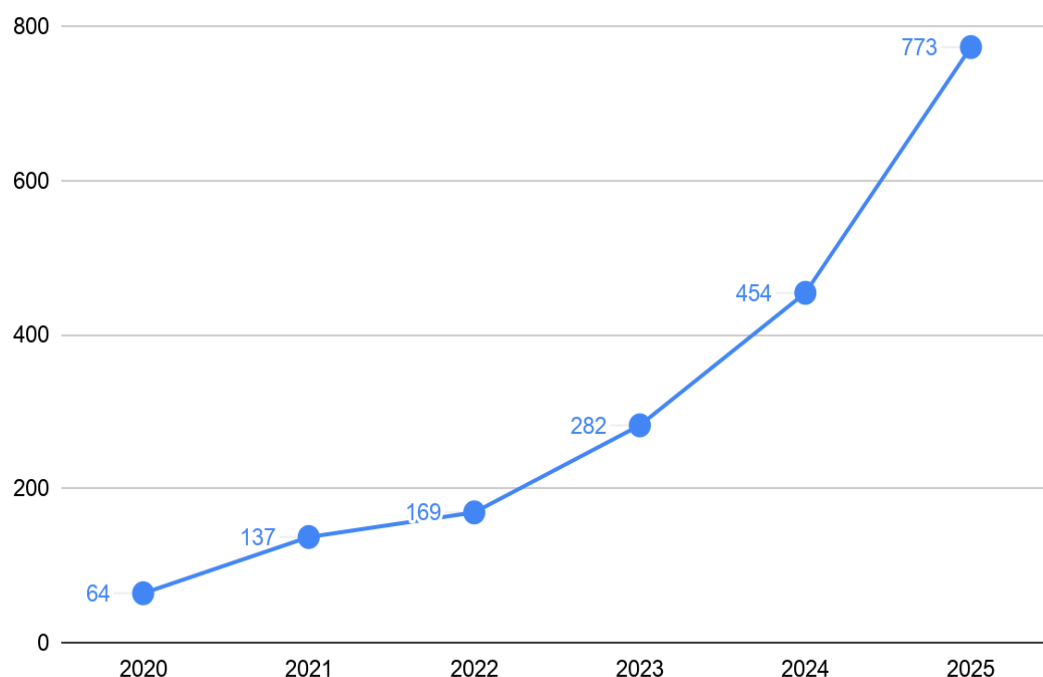
perlunya memastikan produk impor yang masuk ke Indonesia tetap memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Selain itu, tren ini juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi jenis produk atau bahan yang masih bergantung pada pasokan luar negeri, sehingga dapat mendorong penguatan kapasitas industri dalam negeri.

Sebagai tindak lanjut, Ditwas OTSK perlu memperkuat pengawasan impor suplemen kesehatan melalui evaluasi kesesuaian dokumen impor, pemantauan kepatuhan importir, pengawasan penandaan dan klaim produk, serta analisis tren komoditas impor sebagai dasar pembinaan pelaku usaha dan penguatan daya saing produk dalam negeri

Industri suplemen kesehatan memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung masyarakat Indonesia yang lebih sehat, oleh karena itu adanya tren peningkatan ekspor suplemen kesehatan terutama pada tahun 2025 merupakan indikator positif dalam pertumbuhan berkelanjutan industri suplemen kesehatan di Indonesia.

Surat Keterangan *Special Access Scheme*

Di samping SKI dan SKE, BPOM juga mengeluarkan surat keterangan untuk tujuan tertentu atau *Special Access Scheme* (SAS). Pada tahun 2025 BPOM telah menerbitkan 773 Surat Keterangan SAS yang terdiri dari 8 SAS obat bahan alam, 48 SAS produk suplemen kesehatan, 81 SAS bahan obat bahan alam, 367 SAS bahan suplemen kesehatan, 5 SAS produk obat kuasi dan 93 SAS bahan kimia HS Code obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen Kesehatan.



Grafik 31 Profil SAS yang Diterbitkan oleh BPOM tahun 2020-2025

Peningkatan impor melalui jalur *Special Access Scheme* (SAS) dari tahun ke tahun menjadi indikator adanya kebutuhan khusus terhadap produk tertentu, baik untuk keperluan pelayanan kesehatan, penelitian, pengembangan, maupun kebutuhan terbatas lainnya. Meskipun mekanisme SAS memberikan ruang pemenuhan kebutuhan secara khusus, peningkatan jumlah impor perlu diimbangi dengan penguatan evaluasi dokumen, ketertelusuran penggunaan produk, serta pengawasan terhadap kepatuhan pemohon agar produk yang masuk tetap digunakan sesuai peruntukan dan tidak beredar secara tidak sesuai ketentuan.

Jumlah SAS Tahun 2025 yang diterbitkan berdasarkan kategori komoditi antara sebagai berikut:

No	JENIS KOMODITI	JUMLAH REKOMENDASI
1	Obat Bahan Alam	8
2	Suplemen Kesehatan	48
3	Obat Kuasi	5
4	Bahan Obat Bahan Alam	81
5	Bahan Suplemen Kesehatan	367
6	Bahan Kimia HS Code OBA, OK dan SK	264
Jumlah Rekomendasi		773

Dominasi pemasukan SAS untuk pengembangan produk baru suplemen kesehatan mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas riset, formulasi, dan inovasi produk oleh pelaku usaha. Namun, kondisi ini juga menjadi sinyal perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap jenis produk atau bahan yang banyak diajukan melalui SAS, termasuk apakah produk tersebut berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk terdaftar di Indonesia. Dengan demikian, data SAS tidak hanya menjadi instrumen pengawasan pemasukan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemetaan tren inovasi, kebutuhan industri, dan potensi pengembangan produk suplemen kesehatan nasional.

3. Upgrading Pemahaman Penerapan Cпотв Pada Personil Kunci Industri Obat Bahan Alam (Oba), Obat Kuasi (Ok), Dan Suplemen Kesehatan (Sk) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Upgrading Pemahaman Penerapan CPOTB pada Personil Kunci Industri OBA, OK, dan SK secara hybrid pada 3 Juni 2025, 12 Agustus 2025 dan 12 November 2025 di Jakarta.

Penerapan sistem mutu sebagai salah satu aspek dalam CPOBAB merupakan komponen penting dalam menjamin mutu produk OBA, OK, dan SK yang konsisten. Namun, berdasarkan hasil pengawasan dan audit CPOBAB di lapangan, masih ditemukan pelaku usaha di bidang OBA, OK, dan SK yang belum menerapkan sistem mutu secara optimal. Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kompetensi personil kunci industri dan usaha guna memperkuat pemahaman serta kompetensi terkait penerapan CPOBAB, khususnya pada aspek Sistem Mutu IOT (SMIOT).

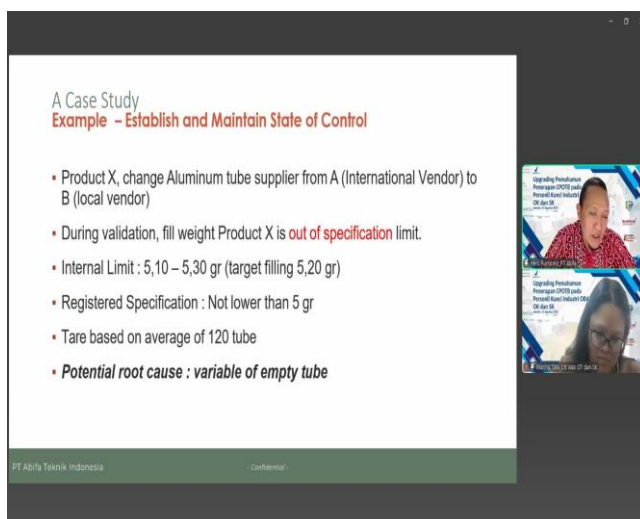
Kegiatan upgrading yang terbagi dalam beberapa materi spesifik ini dilaksanakan secara hybrid melalui metode pembekalan praktis dan pemutakhiran pemahaman yang disampaikan langsung oleh Tim Ahli CPOBAB dan/atau praktisi CPOBAB. Melalui kegiatan ini, diharapkan personil kunci industri dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam penerapan sistem mutu di sarana masing-masing.

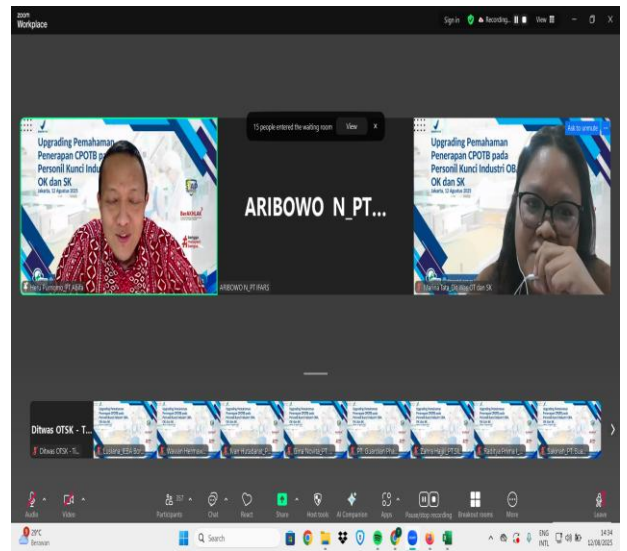
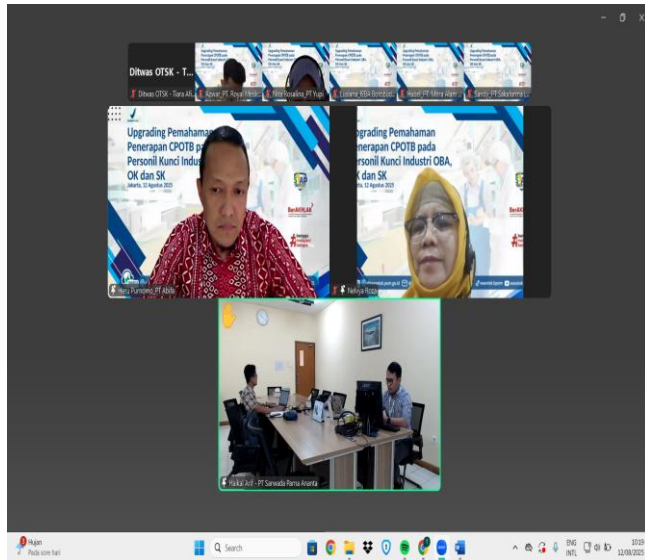
3 Juni 2025



Gambar 14 Upgrading Pemahaman Penerapan Cpome Pada Personil Kunci Industri Obat Bahan Alam (Oba), Obat Kuasi (Ok), dan Suplemen Kesehatan (Sk) - 3 Juni 2025

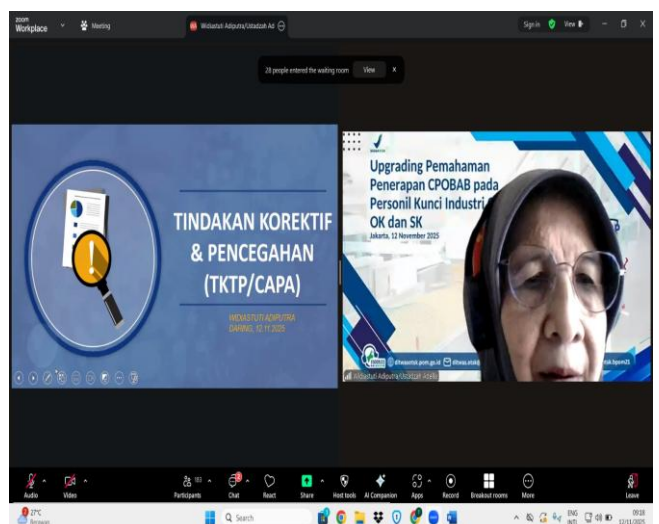
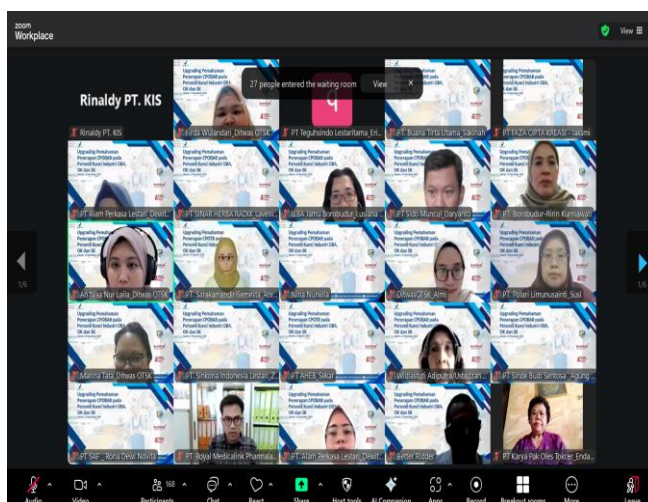
12 Agustus 2025

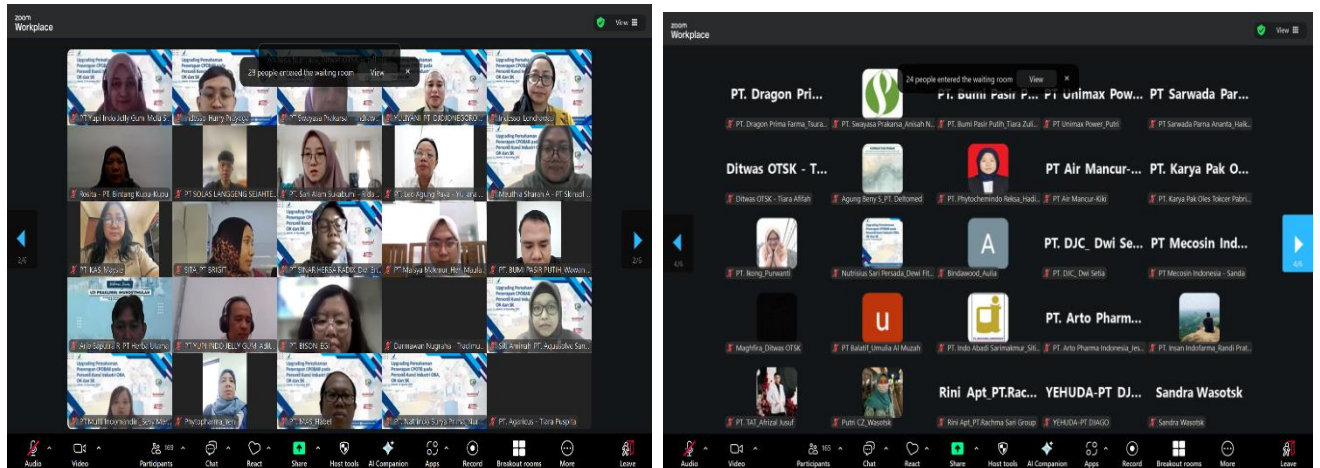




Gambar 15 Upgrading Pemahaman Penerapan Cpomb Pada Personil Kunci Industri Obat Bahan Alam (Oba), Obat Kuasi (Ok), dan Suplemen Kesehatan (Sk) - 12 Agustus 2025

12 November 2025





Gambar 16 Upgrading Pemahaman Penerapan CPOB Pada Personil Kunci Industri Obat Bahan Alam (Oba), Obat Kuasi (Ok), dan Suplemen Kesehatan (Sk) - 12 November 2025

Berdasarkan data terpilah peserta, kegiatan ini diikuti oleh personil kunci industri dari berbagai latar belakang dan jabatan tanpa membedakan gender, sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses materi, berdiskusi, dan memperoleh manfaat pengembangan kompetensi. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, tidak ditemukan kesenjangan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, maupun manfaat karena pelaksanaan pelatihan dilakukan secara terbuka dan inklusif bagi seluruh peserta sesuai kebutuhan industri.

Adapun potensi kesenjangan internal yang dapat memengaruhi partisipasi peserta antara lain perbedaan tingkat pemahaman awal terhadap implementasi CPOBAB dan keterbatasan pengalaman teknis di masing-masing sarana industri. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perbedaan kesiapan sistem mutu dan sumber daya pada setiap pelaku usaha. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menerapkan metode pembelajaran yang aplikatif, interaktif, dan mudah dipahami, serta memberikan kesempatan diskusi langsung dengan Tim Ahli dan praktisi guna memperkuat pemahaman peserta secara merata.

Melalui kegiatan ini, diharapkan personil kunci industri dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam penerapan sistem mutu di sarana masing-masing sehingga mampu mendukung peningkatan kepatuhan industri terhadap penerapan CPOBAB secara berkelanjutan.

4. Forum komunikasi perkuatan pengawasan importasi post-border bahan obat kuasi dan bahan suplemen kesehatan

Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan Forum Komunikasi Perkuatan Pengawasan Importasi Post Border Bahan Obat Kuasi dan Bahan Suplemen Kesehatan sebagai upaya memperkuat efektivitas pengawasan pemasukan produk.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Direktorat Pengawasan OT dan SK terhadap hasil penelusuran data realisasi impor sebagai upaya intensifikasi pengawasan pemasukan post border dan peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi pemasukan bahan Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan. Faktor kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha untuk mengurus SKI sebelum kedatangan barang atau maksimal 7 hari setelah barang keluar dari pelabuhan serta melakukan *self-assessment* pada aplikasi e-bpom menjadi hal yang perlu segera diatasi karena selain berpotensi menyebabkan kerugian terhadap pendapatan negara, pemasukan Obat dan Makanan yang tidak memiliki SKI Badan POM juga berisiko terhadap kesehatan karena tidak melalui evaluasi keamanan, mutu dan khasiat oleh Badan POM.



Gambar 17 Forum komunikasi perkuatan pengawasan importasi post-border bahan obat kuasi dan bahan suplemen

Forum komunikasi ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Teknis Kepabeanan serta Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Lembaga *National Single Window* (LNSW) yang memberikan pemaparan komprehensif mengenai pengawasan impor melalui mekanisme border dan post border, komoditas obat dan makanan yang beririsan dengan Kementerian/Lembaga, serta pengawasan kepabeanan terhadap importasi obat dan makanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan impor Obat dan Makanan yang efektif, sinergis, dan berkelanjutan.

5. Forum Komunikasi Dan Monitoring Evaluasi Program Eksportala
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan Forum Komunikasi dan Monitoring Evaluasi Program

EKSPORTALA sebagai upaya memperkuat sinergi serta meningkatkan daya saing Obat Bahan Alam (OBA), Obat Kuasi (OK), dan Suplemen Kesehatan (SK) di pasar internasional.



Gambar 18 Forum Komunikasi Dan Monitoring Evaluasi Program Eksportal

Kegiatan ini menghadirkan pemaparan dari BPOM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Atase Perdagangan KBRI, serta sesi berbagi pengalaman dari pelaku usaha eksportir. Forum ini menjadi wadah diskusi strategis untuk memperluas pemahaman mengenai peluang pasar global, regulasi negara tujuan ekspor, serta berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam pengembangan ekspor OBA, OK, dan SK. Melalui penguatan ekosistem ekspor OBA, OK, dan SK, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas, nilai tambah produk, serta kontribusi ekspor nasional. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat citra produk Indonesia di pasar internasional sebagai bagian dari dukungan menuju visi Indonesia Emas 2045.

6. Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik

Pada tahun 2025, Ditwas OTSK menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Publik “Recharge & Refresh: Managing Multiple Tasks with Confidence and Efficiency for Service Excellent” sebagai upaya peningkatan kapasitas petugas layanan publik dalam memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Kegiatan ini diikuti oleh 75 peserta, terdiri atas 12 peserta laki-laki dan 63 peserta perempuan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat ketangguhan mental petugas dalam menghadapi dinamika tugas pelayanan, meningkatkan kemampuan manajemen waktu dan prioritas kerja, serta membangun rasa percaya diri dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penyegaran untuk meningkatkan motivasi kerja, keseimbangan emosional, serta penguatan pola pikir pelayanan prima melalui peningkatan empati, komunikasi efektif, dan responsivitas terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Melalui pelatihan ini, petugas layanan publik Ditwas OTSK memperoleh penguatan kompetensi dalam membangun mindset pelayanan prima, menerapkan strategi multitasking dan manajemen waktu, serta meningkatkan kemampuan komunikasi efektif dan empatik dalam pelayanan. Dampak dari kegiatan ini tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik Ditwas OTSK yang lebih cepat, tepat, responsif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat komplain dari pengguna layanan terkait petugas layanan, serta Ditwas OTSK berhasil memperoleh predikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori Pelayanan Prima Tahun 2025. Berdasarkan analisis gender terhadap pelaksanaan kegiatan, tidak ditemukan kesenjangan dalam aspek akses dan partisipasi karena seluruh pegawai memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti pelatihan sesuai peran dan tugasnya. Namun demikian, data partisipasi menunjukkan bahwa jumlah peserta perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang dipengaruhi oleh komposisi petugas layanan publik yang mayoritas diisi oleh pegawai perempuan. Dari aspek kontrol dan manfaat, seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti

materi, berdiskusi, serta memperoleh manfaat peningkatan kompetensi pelayanan publik.

Adapun faktor internal yang memengaruhi perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan antara lain komposisi SDM pada fungsi pelayanan publik yang didominasi oleh pegawai perempuan, sementara faktor eksternal berkaitan dengan tuntutan dan karakteristik pekerjaan pelayanan yang membutuhkan intensitas interaksi tinggi dengan pengguna layanan. Untuk meminimalisir potensi kesenjangan, Ditwas OTSK telah menerapkan prinsip kesempatan yang setara dalam penugasan dan pengembangan kompetensi, pemanfaatan data terpilah dalam evaluasi kegiatan, serta memastikan seluruh pegawai memperoleh akses yang sama terhadap pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Melalui pelatihan ini, petugas layanan publik Ditwas OTSK memperoleh penguatan kompetensi dalam membangun *mindset* pelayanan prima, menerapkan strategi *multitasking* dan manajemen waktu, serta meningkatkan kemampuan komunikasi efektif dan empatik dalam pelayanan. Dampak dari kegiatan ini tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik Ditwas OTSK yang lebih cepat, tepat, responsif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat komplain dari pengguna layanan terkait petugas layanan, serta Ditwas OTSK berhasil memperoleh predikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori Pelayanan Prima Tahun 2025.

7. Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Pada tahun 2025, Ditwas OTSK sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terus memperkuat kualitas layanan melalui pemenuhan standar pelayanan, peningkatan profesionalisme petugas, penyediaan sarana prasarana yang mendukung, optimalisasi sistem informasi pelayanan publik, serta penguatan kanal konsultasi dan pengaduan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, Ditwas OTSK memperoleh Indeks Pelayanan Publik

sebesar 4,93 dengan kategori A atau Pelayanan Prima, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah berjalan sangat baik dan memenuhi sebagian besar aspek penilaian, meliputi kebijakan pelayanan, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi UPP Ditwas OTSK telah mampu menunjang pelayanan publik yang lebih responsif, mudah diakses, informatif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Keberadaan sistem informasi, kanal konsultasi, serta mekanisme pengaduan yang berjalan baik menjadi sarana penting dalam menjawab kebutuhan konsumen dan pemangku kepentingan, baik dalam memperoleh informasi, menyampaikan pertanyaan, maupun mendapatkan tindak lanjut atas permasalahan layanan. Dengan predikat Pelayanan Prima, Ditwas OTSK berkomitmen untuk terus menjaga konsistensi mutu layanan, memperkuat profesionalisme SDM, dan melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik Badan POM.

SK. 6 Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang optimal

1. Temu kinerja tw 2 tahun 2025: atur strategi menuju wbbm

Belum berhasil meraih predikat WBBM pada tahun 2025 bukan berarti gagal. Momentum ini menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi, berbenah, menyusun strategi yang lebih baik, dan kembali melangkah dengan semangat yang lebih kuat.

Pada kegiatan TEKIN (Temu Kinerja) Triwulan II, diangkat tema “Refleksi Kinerja: Belajar dari Proses, Bergerak untuk Progres” sebagai pengingat bahwa evaluasi, pembelajaran, dan tindak lanjut nyata merupakan kunci dalam mewujudkan kinerja yang lebih optimal menuju pencapaian predikat WBBM Direktorat Pengawasan OTSK pada tahun 2026.

Meskipun perjalanan menuju WBBM tidak mudah, semangat kebersamaan dan komitmen seluruh pegawai menjadi modal penting untuk terus bergerak maju dan mewujudkan target yang diharapkan.





Gambar 19 Temu kinerja tw 2 tahun 2025

BAB 4

Penutup

Kesimpulan

Laporan tahunan ini menyoroti pentingnya peran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di Indonesia. Selama tahun 2025, Direktorat ini telah fokus pada penguatan institusi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan peningkatan sumber daya manusia yang profesional. Program pengawasan yang mencakup penilaian sarana produksi dan distribusi, evaluasi promosi, serta pengawasan keamanan produk, merupakan langkah strategis dalam mendukung kesehatan masyarakat. Laporan ini juga mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas tata kelola di tahun-tahun mendatang. Dalam pelaksanaannya, Direktorat menghadapi tantangan berupa kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada adanya pembatasan atau penundaan sejumlah kegiatan. Meskipun demikian, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, penajaman prioritas program, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, Direktorat tetap berupaya secara maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan pengawasan serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat.

Saran

laporan tahunan ini menekankan perlunya peningkatan kinerja dalam menghadapi tantangan pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan di Indonesia. Untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu, serta meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan global, beberapa upaya perlu dilakukan:

1. Implementasi Reformasi dan Birokrasi: Peningkatan reformasi birokrasi di setiap kelompok kerja sangat penting untuk mendukung peningkatan kinerja Badan POM. Reformasi ini harus difokuskan pada penyederhanaan proses kerja, penguatan koordinasi antar divisi, dan peningkatan akuntabilitas di setiap level organisasi

2. Peningkatan Pelayanan Prima: Mendorong pelayanan prima melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting. Pelatihan dan bimbingan teknis harus terus ditingkatkan, terutama bagi pejabat atau pegawai yang terlibat langsung dengan masyarakat. Inovasi dalam pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar juga harus terus dikembangkan
3. Penguatan Sistem Pengawasan: Sistem pengawasan perlu diperkuat melalui pengembangan program internal dan eksternal, khususnya dalam perencanaan dan monitoring kegiatan serta pelaksanaan anggaran. Langkah ini akan memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan dan anggaran digunakan secara efektif

Tim Kerja

Pada tahun 2025, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terus berkembang berkat dedikasi tim profesional kami dalam mencapai sasaran kegiatan. Dengan jumlah karyawan sebanyak 71 orang yang terdiri dari berbagai keahlian fungsional dan administratif, kami mengusung budaya kerja "SIAP" (Sigap, Inovatif, Akurat, Peduli) dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja serta kontribusi kami untuk memastikan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi yang beredar dimasyarakat aman dan bermutu.